

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATAPENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Wilayah	1
1. Aspek Geografis	1
1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	1
1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	3
1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	4
1.3.1. Sektor Pertanian	4
1.3.2. Sektor Pariwisata	8
1.3.3. Sektor Industri.....	10
2. Aspek Demografis.....	10
2.1. Perkembangan dan Jumlah Sebaran Penduduk....	10
2.2. Kepadatan Penduduk	12
2.3. Pertumbuhan Penduduk	14
B. Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Riau	15
C. Permasalahan Utama dan Issu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Perencanaan Kinerja.....	23
1. Visi dan Misi Provinsi Riau.....	24
1.1. Visi Provinsi Riau	24
1.2. Misi Provinsi Riau.....	24
2. Tujuan dan Sasaran	26
B. Perjanjian Kinerja	28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
1. Sasaran 1 : MeningkatkanDerajatPendidikanMasyarakat	35
2. Sasaran 2 : MeningkatkanDerajatKesehatanMasyarakat	40
3. Sasaran 3 : MeningkatkanKesetaraan Gender.....	44
4. Sasaran 4 : MeningkatkanKerukunanHidupBeragama ...	48
5. Sasaran5 : MeningkatkanPelayananTransportasi	51
6. Sasaran6 : MeningkatkanCakupanPelayananInfrastruktur Permukiman.....	54
7. Sasaran7 : .. MeningkatkanCakupanLayananListrikBagi Rumahtangga	61
8. Sasaran8 : MeningkatkanInfrastrukturPengelolaandan KonservasiSumberDaya Air	65
9. Sasaran 9 : MeningkatkanKualitasLingkunganHidup	68
10. Sasaran 10 :MenurunnyaEmisi Gas RumahKaca	77
11. Sasaran 11: MeningkatkanKemandirianEkonomidan MenurunkanKesenjanganPendapatan	82
12. Sasaran 12 : MeningkatkanInvestasi Daerah	90
13. Sasaran 13 : MeningkatkanKetahananPangan Daerah....	93
14. Sasaran 14 :MenurunnyaAngkaKemiskinandan Pengangguran	96
15. Sasaran 15 :MeningkatnyaKebudayaanMelayu Riau yang MendapatkanPerlindungan, Pengembangan, PemanfaatandanPembinaan.....	104
16. Sasaran 16 : MeningkatkanKunjunganWisatawanManca- Negara	109
17. Sasaran 17 : Meningkatkannyakenyamananwisatawan Mancanegara	115
18. Sasaran 18 : MeningkatkanPenerapanReformasiBirokrasi	118
19. Sasaran 19 : MeningkatkanPenerapane-government	124

B. Realisasi Anggaran	128
1. Pendapatan Daerah.....	128
2. Belanja Daerah	129
BAB IV PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Strategi untuk mencapai kinerja di masa mendatang	141

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Isi	Halaman
1.1. Peta Provinsi Riau	1
1.2. Peta Batas Wilayah Provinsi Riau.....	2
1.3. Peta Geografis Provinsi Riau	3
1.4. Peta Tutupan Lahan Provinsi Riau	7
1.5. Gambar Objek Wisata Riau	9
2.1. Visi dan Misi Gubernur Riau RPJMD 2019-2024	25
2.2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Provinsi Riau.	27

DAFTAR GRAFIK

Isi	Halaman
1.1. Penggunaan Lahan Provinsi Riau, tahun 2016	5
1.2. Luas dan Distribusi Penggunaan Lahan	7
1.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019	12
1.4. Distribusi Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019	13
1.5. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2010-2019	14
1.6. Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Riau	16
3.1. Rata-rata Lama Sekolah usia >15 tahun Provinsi Riau 2015-2020	36
3.2. AngkaHarapanHidupProvinsi Riau Tahun 2016-2020	41
3.3. AngkaHarapanHidupProvinsi Se Sumatera dan Nasional, 2020	42
3.4. IPG ProvinsiRiau danNasional2014-2019	45
3.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Provinsi Riau 2015-2020	57
3.6. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi LayakProvinsi Riau 2018-2020	60
3.7. Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau 2018-2020	63
3.8. IKA Provinsi Riau tahun 2015-2020	70
3.9. IKU Provinsi Riau tahun 2015-2020	73
3.10. IKTL Provinsi Riau tahun 2015-2020	75
3.11. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau 2014-2020	80
3.12. Nilai GiniRasioProvinsiRiau 2016-2020	88
3.13. NilaiPembentukan Modal TetapBrutoProvinsi Riau, 2020	92
3.14. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau, September 2014-September 2020	97
3.15. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau dari 2016-2020	100
3.16. PerbandinganJumlahKunjunganWisatawanMancanegara 2013-2020 .	112
3.17. Perbandingan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara 2017-2020	117
3.18. Perkembangan IndeksReformasiBirokrasiProvinsi Riau 2015-2019	123
3.19. Indeks SPBE Provinsi Riau tahun 2019	127

DAFTAR TABEL

Isi	Halaman
1.1. Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Riau, tahun 2018	6
1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2014-2019	11
2.1. Perjanjian Kinerja Gubernur Riau Tahun 2020	28
3.1. Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 15 Provinsi Riau Tahun 2020	35
3.2. Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau tahun 2020	37
3.3. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, 2020	38
3.4. Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Riau tahun 2020.....	41
3.5. Capaian IPG Provinsi Riau tahun 2020	45
3.6. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau tahun 2020	49
3.7. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara	51
3.8. Jumlah Pergerakan Orang/Barang Tahun 2020	52
3.9. Jumlah Pergerakan Orang/Barang Tahun 2019	53
3.10. Capaian Kinerja Persentase Air Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum	56
3.11. Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak.....	59
3.12. Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi	62
3.13. Capaian Kinerja Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi dengan Baik	66
3.14. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air.....	69
3.15. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara	72
3.16. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan	74
3.17. Capaian Kinerja Emisi Gas Rumah Kaca	79
3.18. Capaian Kinerja PDRB ADHK Dalam Juta Rupiah	83
3.19. Nilai PDRB ADHK Provinsi Riau per Lapangan Usaha Tahun 2020	84
3.20. Capaian Kinerja Koefisien Gini	87
3.21. Capaian Kinerja PMDN dalam Juta Rupiah	91
3.22. Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94
3.23. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau tahun 2020	96
3.24. Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau tahun 2020	99
3.25. Persentase Pertumbuhan TPT se-Sumatera Tahun Provinsi Riau	101

3.26.	Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan di Provinsi Riau tahun 2020	105
3.27.	Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan di Provinsi Riau tahun 2020.	106
3.28.	Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan di Provinsi Riau tahun 2020.....	107
3.29.	Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Riau tahun 2020.....	110
3.30.	Data Jumlah Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Riau Tahun 2020 .	111
3.31.	Capaian Kinerja Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Di Provinsi Riau Tahun 2020	115
3.32.	Data Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Riau Tahun 2020	116
3.33.	Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2020	119
3.34.	PMPRB Provinsi Riau Tahun 2020	120
3.35.	Capaian Kinerja SPBE	125
3.36.	Bobot Penilaian Evaluasi SPBE	126
3.37.	Realisasi Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020.....	129
3.38.	Rincian Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 .	130
		131

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau berusaha untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Riau. Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing sasaran berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwadari 19 sasaran dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 12 indikator capaiannya Sangat Baik, 12 indikator capaiannya Baik, 3 (tiga) indicator capaiannya Cukup. Dari hasil pengukuran kinerja

tersebut, rata-rata capaian kinerja indicator Tahun 2020 adalah sebesar **108,45%** atau kategori **Sangat Baik**.

Capaian tersebut tidak terlepas dari peran perangkat daerah, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kinerja Pemerintah yang berorientasi kepada hasil dan memberikan dampak kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau telah mampu menunjukkan peningkatan kinerja

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Kinerja Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau yang dijabarkan melalui Sasaran Strategis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, dan sebagai laporan atas penyelenggaraan Tahun Kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai sarana Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan mengukur capaian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berikutnya.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Riau pada tahun mendatang.

Pekanbaru, Maret 2021

GUBERNUR RIAU,



A. GAMBARAN UMUM WILAYAH

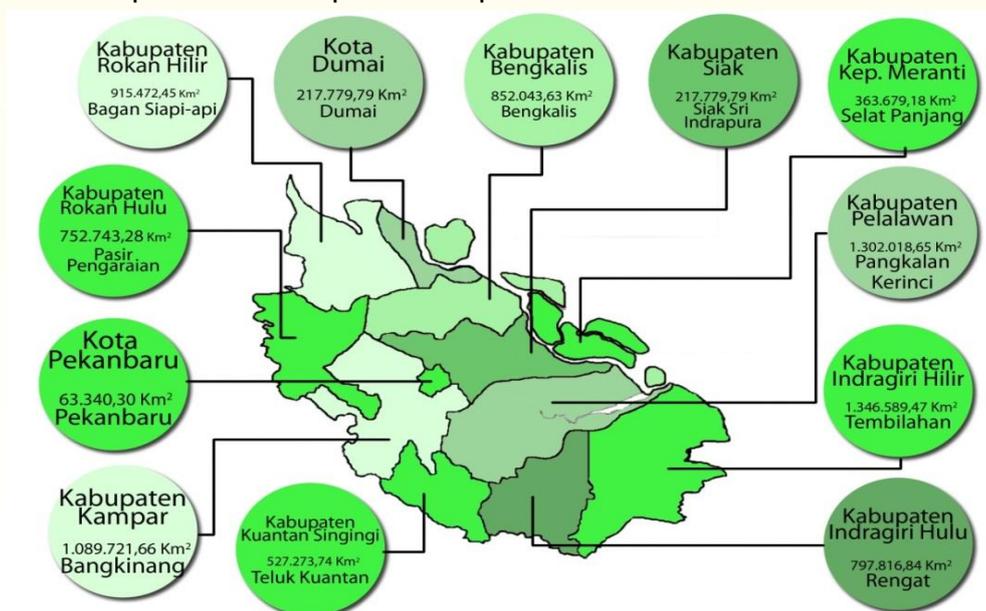
Gambaran umum Provinsi Riau menurut aspek geografi dan demografi Provinsi Riau.

1. Aspek Geografi

Aspek geografi Provinsi Riau mencakup luas dan batas wilayah administrasi, kondisi geografis dan potensi pengembangan wilayah.

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota serta 164 Kecamatan dan 1.846 Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 90.128,76 km², terdiri dari 89.083,57 km² luas daratan dan 1.045,19 km² luas lautan atau perairan. Masing-masing luas Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1. Peta Provinsi Riau

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018-2038

Provinsi Riau secara geografis berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara tetanggasebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2. Peta Batas Wilayah Provinsi Riau

Berdasarkan peta geografis, maka Provinsi Riau berbatasan dengan :

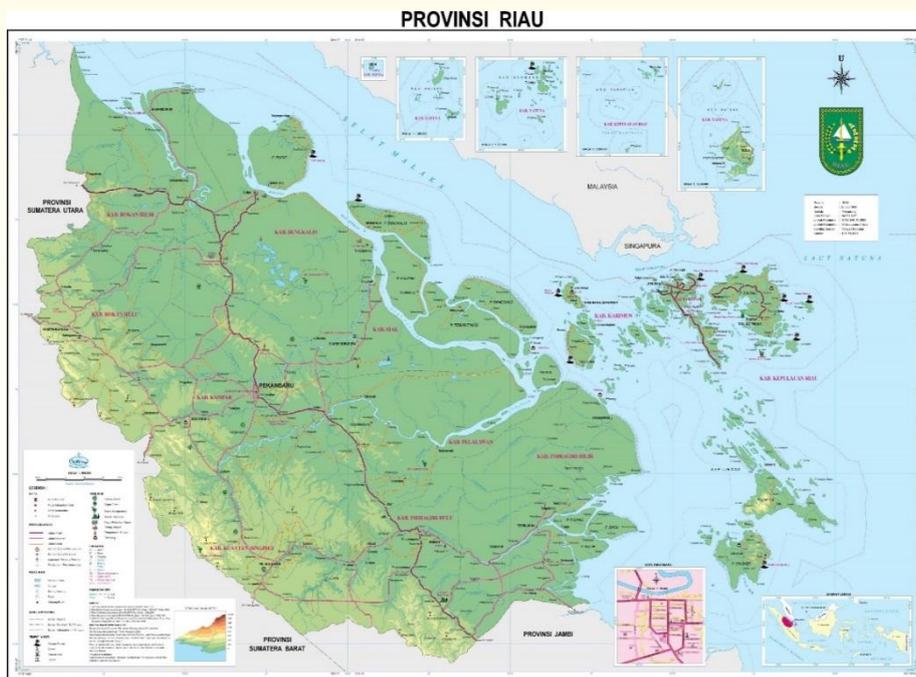
- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Berdasarkan aspek perwilayahan Provinsi Riau berada pada wilayah timur Sumatera yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis adalah posisi daerah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, ditentukan berdasarkan aspek astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara dan antara 100°00'00" Bujur Timur hingga 105°05'00" Bujur Timur, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga Selat Malaka (Gambar 1.3.).

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Riau berada pada posisi strategis yang mempunyai arti penting dalam geopolitik dan perekonomian nasional dan regional. Berada pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura. Selain itu, berada di segitiga pertumbuhan ekonomi (*growth triangle*) Indonesia, Malaysia dan Thailand.



Gambar 1.3. Peta Geografis Provinsi Riau

1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Percepatan pembangunan sangat tergantung dari kondisi kewilayahan, infrastruktur, luas wilayah serta kelancaran urusan administratif. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi luasnya wilayah administrasi Provinsi Riau, maka menuntut adanya pemerataan pembangunan terutama pada wilayah-wilayah yang relatif jauh dari ibu kota Provinsi Riau.

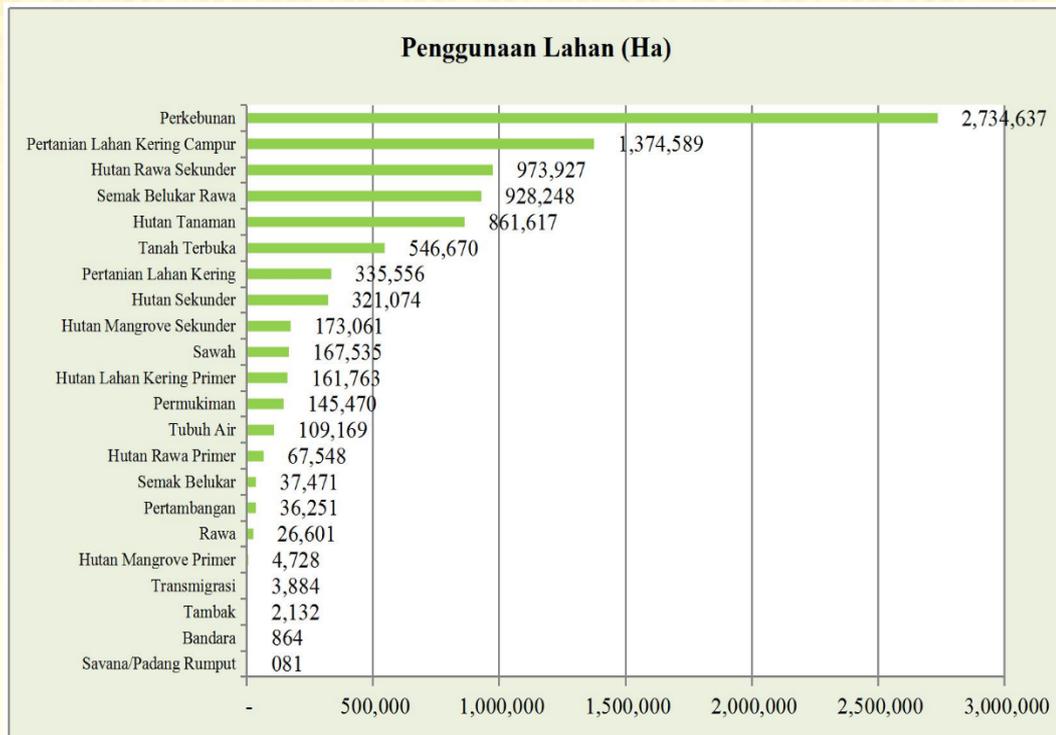
Dengan adanya pemekaran Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau berdampak secara tak langsung terhadap tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru sehingga mendorong menggeliatnya perekonomian masyarakat sekitar. Terutama pada sektor-sektor perdagangan, transportasi, industri, pemasaran hasil-hasil pertanian masyarakat, pariwisata, perhotelan, dan sektor lainnya.

Selain tumbuhnya beberapa sektor perekonomian sebagaimana diuraikan diatas, Provinsi Riau memiliki potensi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor kelautan, dan pertambangan.

1.3.1. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian di Provinsi Riau dilihat dari jenis lahan yang dimanfaatkan terdiri dari lahan basah dan lahan kering dengan luas 8,88 juta hektar dengan persentase distribusi luas lahan menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Luas lahan menurut jenis (lahan basah dan lahan kering) terluas dari total luasan Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 1,355 juta hektar (15,18%) dan tersempit di Kota Pekanbaru sebanyak 0,063 juta hektar (0,71%). Pengembangan lahan kering untuk pertanian sebagian besar digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan yang dapat dilihat dari Grafik halaman berikut.



Grafik 1.1. Penggunaan Lahan di Provinsi Riau, tahun 2016

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2018-2038 bahwa arahan untuk areal penggunaan lain menyesuaikan menurut Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau. Sedangkan pengembangan sektor-sektor potensi baik pertanian dan non pertanian sudah dituangkan dalam RTRW Provinsi Riau 2018-2038. Berdasarkan luasan penggunaan lahan eksisting tahun 2017 menurut tutupan lahan menunjukkan bahwa terdapat dua sub sektor yang mendominasi penggunaan lahan yaitu perkebunan dan kehutanan. Kawasan budidaya ruang daratan di wilayah Provinsi Riau, mencakup didalamnya kawasan pesisir, lokasinya tersebar ke seluruh wilayah kabupaten dan kota. Kawasan budidaya tersebut dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut, Kawasan Hutan Produksi direncanakan untuk dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota dan Kawasan Hutan Rakyat dikembangkan diseluruh wilayah Kabupaten dan Kota.

Tabel. 1.1. Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau, tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah	Perkebunan	Tambah	Lainnya	Total Penggunaan Lahan
Kuantan Singingi	21.685,26	81.364,36	10.120,08	225.191,20	-	188.939,89	527.273,74
Indragiri Hulu	58.628,01	213.567,08	85,59	185.677,37	-	339.858,79	797.816,84
Indragiri Hilir	43.230,50	87.838,63	114.037,73	586.276,39	1.865,87	513.340,35	1.346.589,47
Pelalawan	23.164,50	71.705,33	6.042,15	323.493,32	-	877.613,35	1.302.018,65
Siak	24.261,55	54.566,38	15.228,28	234.319,15	38,44	455.983,17	784.396,97
Kampar	13.113,87	270.704,04	-	383.890,49	-	422.013,26	1.089.721,66
Rokan Hulu	86.198,14	249.733,66	684,89	191.128,62	-	224.997,97	752.743,28
Bengkalis	16.192,60	66.408,88	16.051,48	273.938,91	215,21	515.269	852.043,63
Rokan Hilir	45.320,39	163.160,47	3.994,66	53.619,68	12,27	429.045,75	915.472,45
Kep. Meranti	1.773,23	61.639,89	680,99	17.167,89	-	245.965,40	363.679,18
Pekanbaru	1.237,20	8.170,72	-	22.055,25	-	36.764,49	63.340,30
Dumai	777,44	45.729,68	609,49	2.734.636,80	-	148.607,98	217.779,79
Provinsi Riau	335.582,69	1.374.589,12	167.535,34		2.131,79	4.398.427,33	9.012.875,96

Sumber : RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038

Sementara itu persentase distribusi penggunaan luas lahan menurut Kabupaten/Kota lihat pada Grafik 1.2. Luas lahan menurut jenis, terluas dari total luasan Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 1,346 juta hektar (14,94%) dan tersempit di Kota Pekanbaru sebanyak 0,063 juta hektar (0,70%).

Data tutupan lahan ini dapat digunakan untuk memperkirakan berapapotensi pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan peruntukan ruang. Pengembangan sektor-sektor potensi baik pertanian dan non pertanian sudah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Provinsi Riau 2018-2038 sebagaimana tutupan lahan Gambar 1.6 diatas. RTRW Provinsi Riau menunjukkan bahwa pada luas penggunaan lahan eksisting tahun 2017 menurut tutupan lahan, terdapat dua sub sektor yang mendominasi penggunaan lahan yaitu perkebunan dan kehutanan.

Sesuai dengan kondisi kesuburan lahan, jenis lahan dan kesesuaian iklim, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan disamping secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan. Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Pengolahan kelapa sawit dan kelapa serta pengolahan minyak perlu dilakukan agar nilai tambah dapat diperoleh Provinsi Riau. Pengembangan industri pengolahan kelapa ini tidak saja meningkatkan devisa negara dan PDRB Provinsi Riau tetapi juga akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan industri pendukung lainnya. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau sudah menjadi kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

1.3.2. Sektor Pariwisata

Provinsi Riau memiliki daya tarik pariwisata yang dapat dikembangkan sehingga menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Saat ini Provinsi Riau masih mengembangkan potensi wisata secara maksimal termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga dapat menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara serta memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau. Daya tarik wisata yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau antara lain :

1. Wisata Bono, di Kabupaten Pelalawan;
2. Candi Muara Takus, di Kabupaten Kampar;
3. Pacu Jalur, di Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Festival Bakar Tongkang, di Kabupaten Rokan Hilir;
5. Istana Siak Sri Indrapura, di Kabupaten Siak.
6. Kawasan Wisata Pulau Rupat, di Kabupaten Bengkalis.
7. Pantai Solop, di Kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 1.5. Gambar Objek Wisata Riau

1.3.3. Sektor Industri

Pengembangan 2 (dua) Kawasan Industri di Provinsi Riau yang perlu mendapatkan dukungan pengembangan yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak dan Kawasan Industri Kuala Enok di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

2.1. Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk

Penduduk Provinsi Riau tahun 2019 berjumlah 6.717.612 orang terdiri dari laki-laki 3.440.034 orang dan perempuan 3.277.578 orang. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Riau selama periode 2014-2019 mengalami peningkatan sebanyak 783.303 jiwa atau meningkat sebesar 12.65% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,52%.

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Kabupaten/ Kota	Tahun						Pertumbuhan/Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kuantan Singingi	310.619	314.276	317.935	321.216	324.413	327.316	1.23
Indragiri Hulu	400.901	409.431	417.733	425.897	433.934	441.789	2.13
Indragiri Hilir	694.614	703.734	713.034	722.234	731.396	740.598	1.11
Pelalawan	377.221	396.990	417.498	438.788	460.780	483.622	5.27
Siak	428.499	440.841	453.052	465.414	477.670	489.996	2.89
Kampar	773.171	793.005	812.702	832.387	851.837	871.117	2.59
Rokan Hulu	568.576	592.278	616.466	641.208	666.410	692.120	4.19
Bengkalis	536.138	543.987	551.683	559.081	566.228	573.003	1.51
Rokan Hilir	627.233	644.680	662.242	679.663	697.218	714.497	2.81
Kep. Meranti	179.894	181.095	182.152	183.297	184.372	185.516	0.59
Pekanbaru	1.011.467	1.038.118	1.064.566	1.091.088	1.117.359	1.143.359	2.66
Dumai	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	2.15
Provinsi Riau	6.188.442	6.344.402	6.500.971	6.657.911	6.814.909	6.971.745	2.52

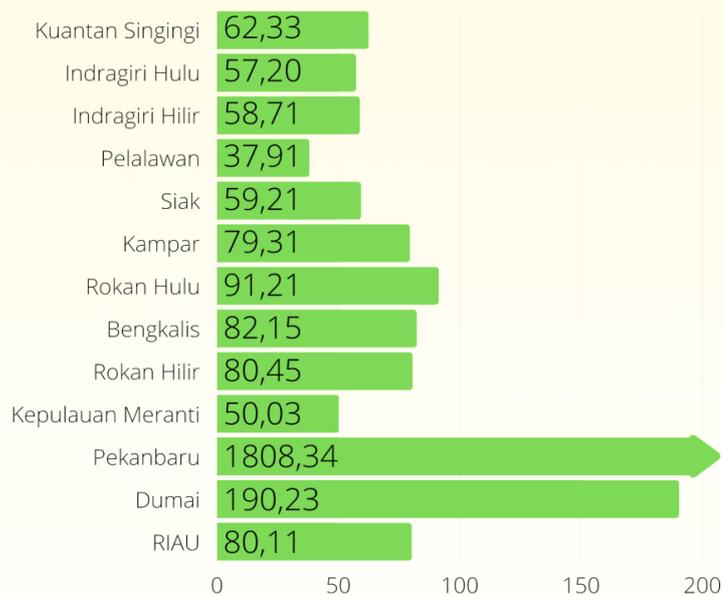
Sumber : BPS Provinsi Riau, 2020

Perkembangan dan penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2014-2019 ditunjukkan pada Tabel 1.2. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mempunyai penduduk paling banyak di Provinsi Riau, sebaliknya Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Pelalawan sebesar 5,27% per tahun, Rokan Hulu sebesar 4,19% per tahun dan Siak sebesar 2,89% per tahun. Tingginya pertumbuhan penduduk pada wilayah ini tidak terlepas dari tersedianya potensi pengembangan wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2019 mencapai 80 jiwa perkm². Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Provinsi Riau tiaptahunnya semakin bertambah dibandingkan tahun 2016 yang hanya 66 jiwa perkm² atau naik sebesar 21,21%, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini.

Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019



Grafik 1.3. Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 (BPS Provinsi Riau, 2020)

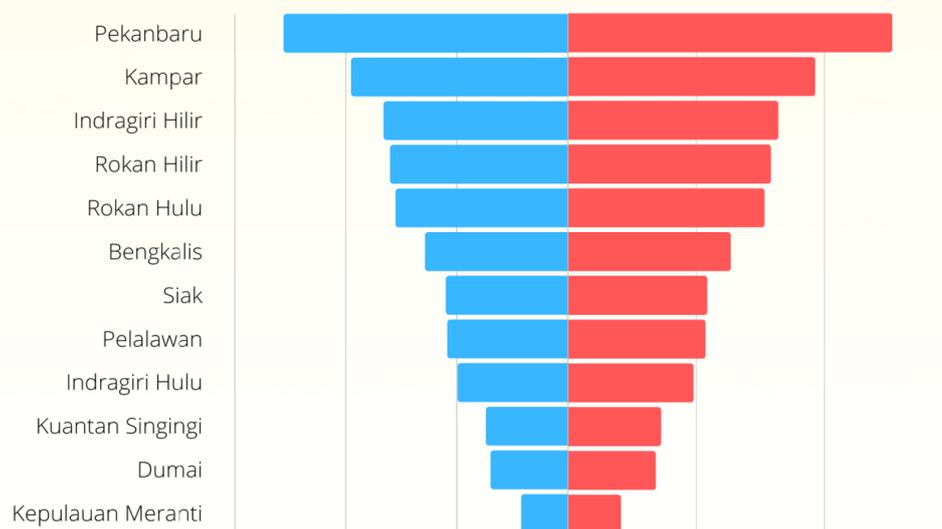
Berdasarkan Grafik 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat adalah Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.808.34 jiwa/km, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.143.359 jiwa atau sebesar 16,40% dari total penduduk Provinsi Riau tahun 2019. Sedangkan

kepadatan penduduk palingsedikit berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebanyak 50 jiwa/km.

Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persoalan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

Sementara itu penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Distribusi penduduk dirinci menurut kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.4.

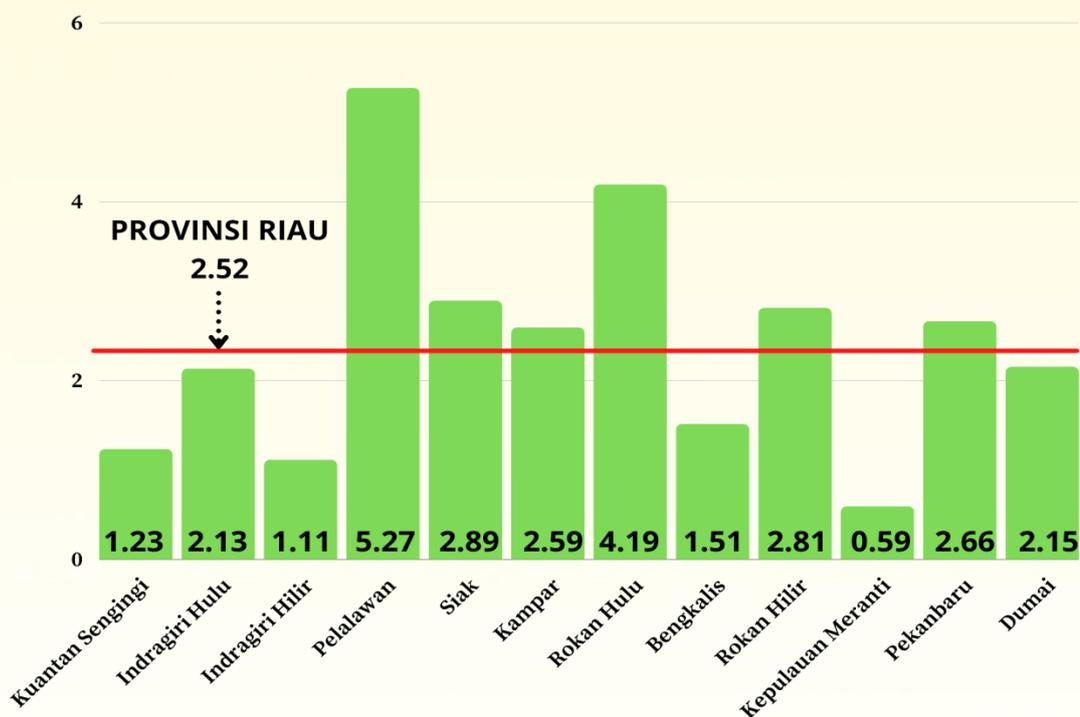
Distribusi Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019



Grafik 1.4. Distribusi Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

2.3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau tergolong tinggi. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan penambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5% per tahun). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dari tahun 2013-2019 mengalamirata-rata peningkatan sebesar 2,25% per tahun, lihat Grafik 1.5.



Grafik 1.5. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2010-2019

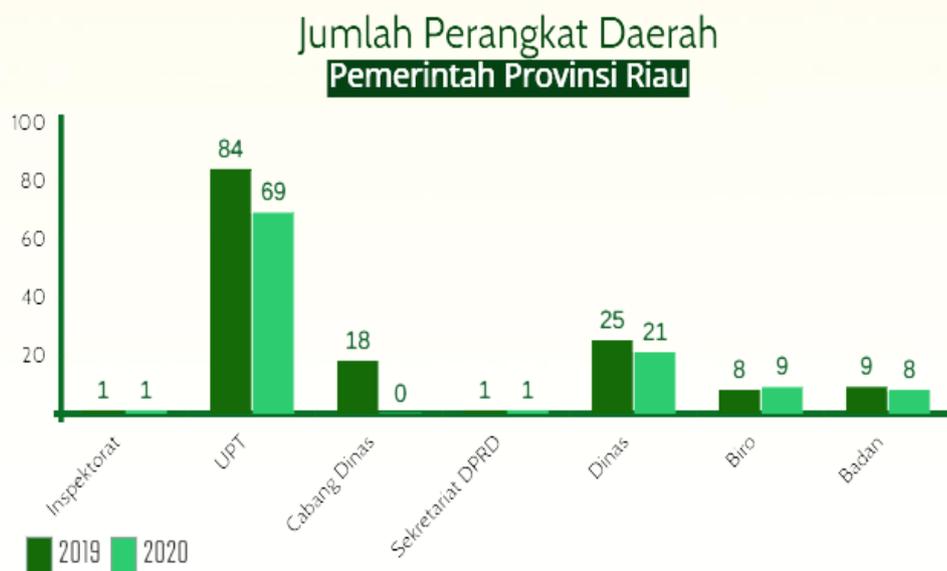
Tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Riau, mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan terutama berasal dari provinsi tetangga. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya jika tidak ada upaya penanganan yang sistematis dan terstruktur.

B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pembentukan organisasi atau kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat jumlah lembaga pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai berikut :



Sumber: Biro Organisasi Provinsi Riau 2020

Grafik 1.6. Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2019

C. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi infrastruktur wilayah, lingkungan dan sumberdaya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang dihimpun kedalam 3 aspek ;

1. Kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan utama pada aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah:

- 1) Pergeseran struktur nilai PDRB harga konstan Provinsi Riau yang semula penyumbang terbesarnya pada tahun 2010-2013 sektor pertambangan dan penggalian, pada 2014-2018 menjadi industri pengolahan, yaitu 30,03%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,82% dan pertambangan penggalian sebesar 19,09%. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan harga dan produksi migas sehingga minat investasi menurun;
- 2) Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau 2011-2018 mengalami penurunan, yang semula pada 2011 sebesar 5,57%, kemudian menurun menjadi 2,34% pada 2018. Walaupun nilai PDRB Harga Konstan Provinsi Riau peringkat ke-2 tertinggi se-Sumatera dan peringkat ke-6 secara Nasional, tapi pertumbuhannya berada pada posisi 33 di Indonesia;
- 3) Belum efektifnya pengendalian inflasi yang tercermin dari angka inflasi yang berfluktuatif, hal ini bukan disebabkan oleh tingginya produksi barang, tetapi karena daya beli masyarakat yang tidak merata;

- 4) Daya beli masyarakat yang tidak merata, meskipun penerimaan PDRB per kapita harga konstan meningkat dari tahun 2016 pada 66,51 juta per kapita menjadi 71,76 juta pada tahun 2018, namun secara umum masih ada 8 Kabupaten yang berada pada PDRB HK per kapita di bawah rata-rata Provinsi Riau; dan
- 5) Masih tingginya ketimpangan antar kabupaten/kota se Provinsi Riau, sesuai dengan Indeks Williamson tahun 2010 sebesar 0,62 meningkat menjadi 0,76 tahun 2018;

2. Pelayanan umum

Pada Aspek Pelayanan Umum dibagi menjadi :

a. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

Pada pelayanan umum ini, yang menjadi permasalahan utamanya adalah :

- 1) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan masih rendahnya kualitas pendidikan, dan terdapat 7 Kabupaten yang masih di bawah rata-rata lama sekolahnya dibawah rata-rata Provinsi;
- 2) Rendahnya angka harapan hidup pada 11 Kabupaten/kota yang berada pada angka di bawah rata-rata provinsi, hal ini dikarenakan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan;
- 3) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas dari infrastruktur di Provinsi Riau;
- 4) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni;
- 5) Banyaknya jumlah konflik lahan, dan tingginya angka kriminalitas; dan
- 6) Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar.

Pada pelayanan umum ini, yang menjadi permasalahan utamanya adalah :

- 1) Kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, relative rendahnya kualitas tenaga kerja dan adanya ketimpangan antara kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan;
- 2) Masih terdapat ketimpangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota;
- 3) Belum optimalnya pengembangan pangan lokal;
- 4) Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 5) Masih belum optimalnya pembinaan terhadap olahragawan dan pemuda; dan
- 6) Belum optimalnya pelestarian budaya khususnya budaya melayu;

c. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- 1) Rendahnya pertumbuhan produksi di bidang perikanan dan kelautan yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumsi;
- 2) Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara;
- 3) Rendahnya pemanfaatan lahan dan produktifitas lahan sawah;
- 4) Tingginya kerusakan kawasan hutan;
- 5) Turunnya tren ekspor di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan penurunan jumlah produksi migas, dan turunnya harga komoditas di pasar global; dan
- 6) Belum optimalnya kawasan industri dan belum berkembang nya industri hilir berbasis sumberdaya lokal;

d. Penunjang Urusan.

Pada pelayanan umum ini meliputi perencanaan pembangunan daerah, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengawasan dan penanggulangan bencana yang menjadi pendukung didalam menjalankan pemerintah.

3. Daya saing daerah.

Permasalahan utama dalam daya saing daerah adalah :

- 1) Tingginya ketimpangan produktifitas antar wilayah, dikarenakan teknologi antar wilayah yang belum merata; dan
- 2) Pergeseran sektor unggulan, yang semula pertambangan, penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan, kedepannya bergeser ke transportasi, pergudangan, pertahanan dan jawaban sosial wajib, serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang;

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Pemerintah Daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan Daerah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu Strategis Provinsi Riau antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing.

Peningkatan ini dilakukan melalui:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan;
- b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- c. Peningkatan daya beli masyarakat;
- d. Peningkatan pemahaman agama; dan
- e. Peningkatan kesadaran masyarakat membayar zakat.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pembangunan berwawasan lingkungan;
Peningkatan ini dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kemantapan jalan provinsi dan pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b. Peningkatan pengelolaan air bersih dan air minum, peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat;
 - c. Peningkatan rasio elektrifikasi;
 - d. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air; dan
 - e. Peningkatan konservasi sumberdaya alam.
3. Peningkatan produktifitas sektor unggulan yang berdaya saing dan penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan ini dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan pengembangan industri hilir;
 - b. Peningkatan kemandirian dan daya saing industri;
 - c. Peningkatan daya tarik investasi;
 - d. Peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan;
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin; dan
 - f. Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja;
4. Peningkatan perlindungan dan pengembangan pemajuan kebudayaan melayu riau dan pengembangan pariwisata;
Peningkatan ini dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan Budaya Melayu;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan melayu;
 - c. Peningkatan penyebaran, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu;
 - d. Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;

- e. Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu;
 - f. Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan, dewan kesenian kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
 - g. Pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan
 - h. Pengelolaan pariwisata.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Peningkatan ini dilakukan melalui:
- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; dan
 - b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Perjanjian Kinerja sebagai referensi pengukuran kinerja pemerintah Provinsi Riau tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Gubernur terpilih yang berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2024.

1. Visi dan Misi Provinsi Riau

1.1. Visi Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 s.d. 2024. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Provinsi Riau. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 s.d. 2024 yang tercantum yaitu :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU) ”

1.2. Misi Provinsi Riau

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi Pembangunan Jangka Menengah.

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi;



Gambar. 2.1. Visi dan Misi Gubernur Riau RPJMD 2019-2024

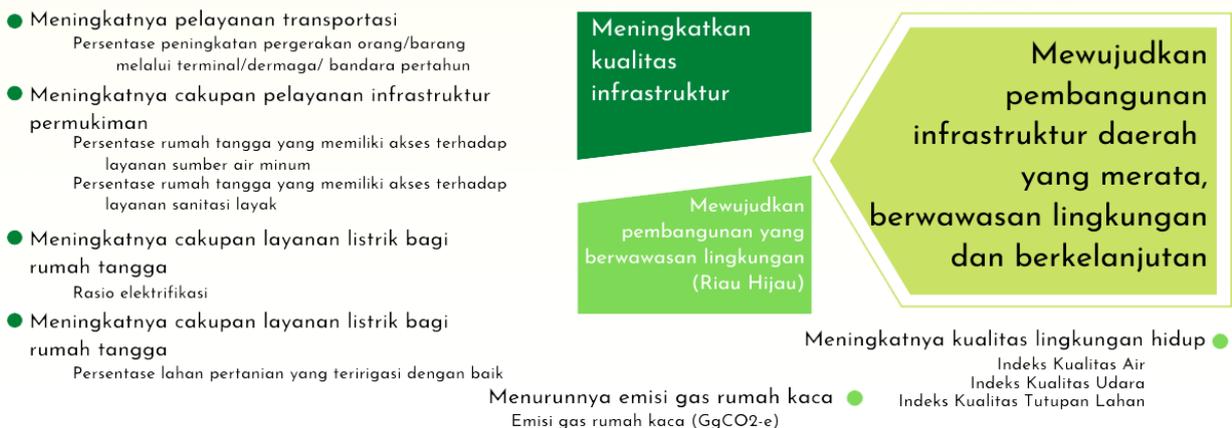
2. Tujuan dan Sasaran

Untuk tercapainya Misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan pembangunan Provinsi Riau. Tujuan pembangunan Provinsi Riau adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dari pembangunan akan dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan potensi, sumber daya dan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada, Pemerintah Provinsi Riau telah merumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan prioritas pembangunan yang akan dicapai setiap tahunnya melalui pelaksanaan anggaran pembangunan Provinsi Riau. Berikut merupakan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau pada setiap Misi :

..... MISI 1



..... MISI 2



MISI 3

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing

Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

- Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan
 Nilai PDRB ADHK
 Koefisien Gini
- Meningkatnya investasi daerah
 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
- Meningkatnya ketahanan pangan daerah
 Indeks Ketahanan Pangan
- Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
 Persentase penduduk miskin
 Tingkat pengangguran terbuka

MISI 4

- Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan
 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan
 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan
 Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan
- Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara
 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
- Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara
 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara

Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu

Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata

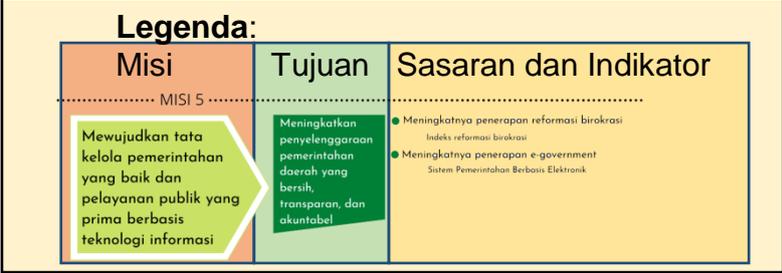
Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing

MISI 5

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

- Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
 Indeks reformasi birokrasi
- Meningkatnya penerapan e-government
 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Gambar. 2.2. Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Pemerintah Provinsi Riau

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penjelasan lebih lanjut dari RKPD tahun 2020 dengan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahun 2020. Perjanjian kinerja tersebut merupakan dokumen perjanjian kinerja antara Gubernur Riau dengan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjelaskan target secara kuantitatif pada setiap indikator kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam tahun 2020.

Berebeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini Perjanjian Kinerja mengalami satu kali perubahan pada tahun berjalan, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak kesegala lini, termasuk pemerintahan, yang mendorong pemerintah untuk tetap berkinerja namun dengan menyesuaikan target yang harus di capai. Berikut sasaran dan indikator beserta target awal dan perubahan Gubernur Riau

Tabel. 2.1. Perjanjian Kinerja Gubernur Riau Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun (tahun)	8.97	8.97
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.57	13.57
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.56	71.56
3	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	89.11	88.51
4	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)	73.34	73.34

No	Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Perubahan
5	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun (%)	0.61	-53,03
6	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum (%)	71.84	71.84
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	78.21	78.21
7	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi (%)	92.85	92.85
8	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik (%)	25.3	29.43
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (indeks)	58.3	58.3
		Indeks Kualitas Udara (indeks)	90.3	90.3
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (indeks)	55.32	57.59
10	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca (GgCO ₂ -e)	343,988	343,988
11	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK (milyar rupiah)	500,882.71	500,882.71
12	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (juta rupiah)	158.703,07	158.703,07
13	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	52	50

No	Sasaran	Indikator	Target Awal	Target Perubahan
14	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin (%)	6.75	6.75
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	6.02	6.02
15	Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan (%)	72	72
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan (%)	5	2
		Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan (%)	5	2
16	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (jiwa)	129.939	47.350
17	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	3.51	1.28
18	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi (indeks)	63.87	63.87
19	Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.17	3.17

Dokumen perjanjian kinerja antara Gubernur Riau dengan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disajikan dalam Lampiran 1. Capaian masing-masing Sasaran akan dijelaskan pada Bab III.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran capaian kinerja dengan kategori sebagai berikut.

Skala Capaian Kinerja	Kategori
Lebih dari 100 %	Sangat baik
75 % sampai 100 %	Baik
55 % sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55 %	Kurang
0	Data Tidak Ada/ Tidak Lengkap

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut.

- 1) Tingkat capaian positif, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- 2) Tingkat capaian negatif, semakin rendah realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 telah menggunakan metode di atas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Persentase Capaian terhadap Target Akhir RPJMD dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian terhadap Target Akhir RPJMD} = \frac{\text{Realisasi 2020}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100\%$$

Catatan: Rumus berlaku untuk indikator dengan data kuantitatif yang bersifat kumulatif

Dalam pengukuran kinerja Provinsi Riau tahun 2020 yang terdiri dari 19 sasaran dan 27 indikator mengacu pada indikator yang ada dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun dan Harapan Lama Sekolah
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup
3. Meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
4. Meningkatnya kerukunan hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama
5. Meningkatnya pelayanan transportasi dengan indikator Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun
6. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
7. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga dengan indikator Rasio elektrifikasi
8. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air dengan indikator Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
10. Menurunnya emisi gas rumah kaca dengan indikator emisi gas rumah kaca (GgCO₂-e)
11. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK dan Koefisien Gini

12. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
13. Meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan
14. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran dengan indikator Persentase penduduk miskin dan Tingkat pengangguran terbuka.
15. Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan dengan indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan, Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan
16. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
17. Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara dengan indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara
18. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks reformasi birokrasi
19. Meningkatnya penerapan e-government dengan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dari beberapa sasaran tersebut terdapat terdapat 12 indikator yang melebihi target 100% dengan kategori pencapaian kinerja “Sangat Baik”, 12 indikator dengan kategori “Baik”, dan 3 (tiga) indikator dengan kategori “Cukup”.

Pencapaian kinerja tersebut secara terperinci akan dijelaskan pada halaman berikut.

1

Sasaran ke-1: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat diukur dari 2 indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur >15 tahun dan Harapan Lama Sekolah.

a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi:

- 1) Partisipasi sekolah
- 2) Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki
- 3) Ijazah tertinggi yang dimiliki
- 4) Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Capaian kinerja rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut:

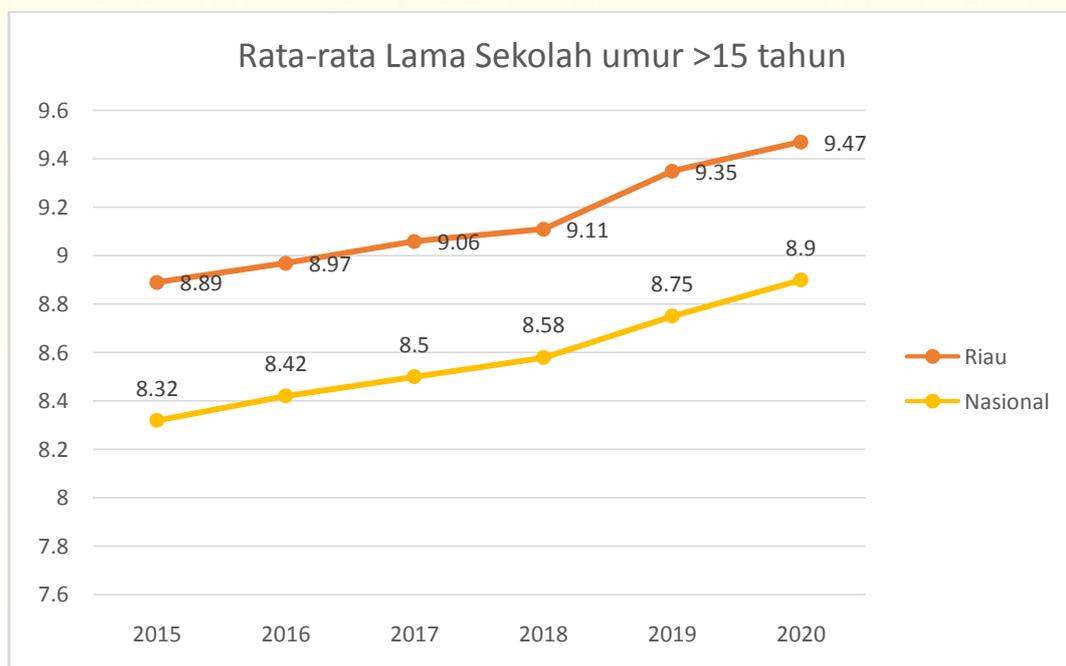
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 15 Provinsi Riau Tahun 2020 (BPS, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun	8.97	9.47	105.57	9.24	9.47	102.49

Berdasarkan Tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa RLS Provinsi Riau pada tahun 2020 telah mencapai 9,47 tahun dari target yang ditetapkan yaitu 8,97 tahun dengan capaian kinerja sebesar 105,57%. Artinya penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Riau rata-rata menyelesaikan pendidikan pada kelas IX (sembilan) Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan hal ini telah mencapai Program Pendidikan Nasional yaitu pencapaian pendidikan minimal 9 tahun.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2019-2024, realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2020 (9,47 tahun) telah mencapai 102,49% dari target yang telah ditetapkan yaitu 9,24 tahun.

Capaian RLS penduduk umur > 15 tahun Provinsi Riau 2015-2020 menunjukkan tren peningkatan secara signifikan pada tahun 2018-2020, secara rinci dijelaskan pada Grafik berikut:



Grafik 3.1. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Riau dan Nasional 2015-2020 (BPS, 2020)

Dari Grafik 3.1. menunjukkan bahwa tren RLS Provinsi Riau melebihi dari capaian Nasional. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar 0,24 tahun. Sedangkan jika dilihat dari tahun 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar 0,12 tahun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya Kebijakan Kepala Daerah dalam peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, melalui peningkatan sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin yang tidak mampu; dan peningkatan mutu/kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

b. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 Tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam perhitungan HLS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), untuk siswa yang bersekolah di pesantren dihitung oleh Direktorat Pendidikan Islam.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau tahun 2020 (BPS,2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Harapan lama sekolah (HLS)	13,57	13,20	97,27	14,28	13,20	92,44

Pada tahun 2020, nilai HLS Provinsi Riau adalah 13,20 tahun dengan capaian kinerja sebesar 97,27% dari target 13,57 tahun (artinya penduduk /anak usia 7 tahun ke atas di Provinsi Riau berpeluang menempuh pendidikan hingga tingkat Diploma I). Dengan demikian upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA hanya mempertahankan nilai HLS dikisaran angka 12 tahun. Untuk meningkatkan pertumbuhan indeks HLS tersebut, maka Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan beberapa kebijakan salah satunya pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024, HLS Provinsi Riau tahun 2020 (13,20 tahun) mencapai 92,44% dari target yang telah ditentukan (14,28 tahun).

Capaian HLS tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,06 tahun (13,14 pada tahun 2019 menjadi 13,20 pada tahun 2020), dan peningkatan ini didukung oleh peningkatan harapan lama sekolah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Tabel 3.3. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, 2020 (BPS, 2020)

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah		
		2020	2019	2018
1	Kuantan Singingi	13,33	13,32	13,27
2	Indragiri Hulu	12,36	12,35	12,32
3	Indragiri Hilir	11,91	11,9	11,89
4	Pelalawan	12,24	12,17	12,16
5	Siak	12,76	12,75	12,73
6	Kampar	13,46	13,45	13,21
7	Rokan Hulu	12,84	12,83	12,82
8	Bengkalis	12,87	12,86	12,83
9	Rokan Hilir	12,68	12,67	12,63
10	Kepulauan Meranti	12,82	12,81	12,78

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah		
		2020	2019	2018
11	Pekanbaru	15,54	15,37	15,34
12	Dumai	13,12	13,1	12,98
	RIAU	13,20	13,14	13,11

Dari Tabel 3.3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi harapan sekolah terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan masih sulitnya aksesibilitas pendidikan pada daerah-daerah terpencil di Kabupaten Indragiri Hilir.

Jika dibandingkan dengan capaian HLS Nasional tahun 2020 (12,98), maka HLS Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 13,20 telah melebihi angka Harapan Lama Sekolah Nasional dengan selisih sebesar 0,22 tahun (BPS, 2020).

Permasalahan/kendala dalam pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya mengetahui jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (AUSTS) pada seluruh jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anak usia sekolah yang tidak mampu bersekolah;
2. Masih adanya kesenjangan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dikarenakan keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesulitan menjangkau lokasi pendidikan;
3. Meningkatnya kesenjangan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi Covid-19 sehingga menurunkan kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan;
2. Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin yang tidak mampu; dan
3. Peningkatan mutu/kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran untuk menunjang Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Riau sebesar Rp 1.156.200.739.690,86 dengan realisasi Rp 1.068.294.883.417,00 (92.40%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasi dalam 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
2. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
3. Program Bantuan Operasional Sekolah; dan
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2 Sasaran ke-2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh

kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan.

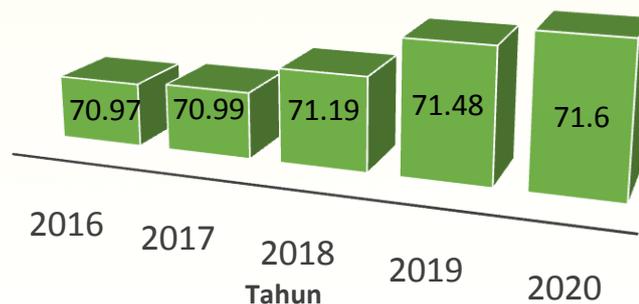
Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2020 dengan indikator Angka Harapan Hidup sebagai berikut.

Tabel 3.4. Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Riau tahun 2020 (BPS, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan Hidup (AHH)	71,56	71,60	100,06	72,03	71,60	99,40

Dari Tabel 3.4. diatas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Riau tahun 2020 adalah 71,60 tahun dengan capaian sebesar 100,06% dari target 71,56 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 99,40% dari target 72,03 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Riau



Grafik 3.2. Angka Harapan Hidup Provinsi Riau 2016-2020 (BPS, 2020)

Selama periode 2016 hingga 2020, Provinsi Riau telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Angka Harapan Hidup meningkat dari

tahun 2016-2020, terutama pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,41%. Sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan 0,16%.

Pertumbuhan Angka Harapan Hidup Provinsi Riau dibandingkan dengan Provinsi lain se Sumatera maka Provinsi Riau menduduki ranking pertama sebagaimana Grafik 3.5 berikut.



Grafik 3.3. Angka Harapan Hidup Provinsi Menurut Provinsi Se Sumatera dan Nasional, 2020 (BPS, 2020)

Peningkatan Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Riau merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah melalui program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi.

Kendala/permasalahan dalam pencapaian angka harapan hidup sebagai berikut.

1. Belum meratanya aksesibilitas dan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah terpencil;

2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara kesehatan;
3. Adanya pandemi covid 19 sehingga membatasi akses dan fasilitas kesehatan masyarakat;

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk peningkatan angka harapan hidup di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama maupun di Rumah Sakit dan penyebarannya pada daerah-daerah terpencil;
2. Promosi kesehatan tentang menjalankan pola hidup sehat kepada masyarakat (Gerakan Masyarakat Sehat); dan
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran tahun 2020 untuk pencapaian kinerja meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar Rp. 744.200.362.748,88 dengan realisasi Rp.651.359.823.957,58(87,52%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasikan pada pelaksanaan 12 (dua belas) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
3. Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD RS;
4. Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
5. Program keluarga berencana;
6. Program pembiayaan kesehatan;
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;
9. Program pelayanan kefarmasian dan Alkes;
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan;

11. Program pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan; dan

12. Program pembinaan dan pengembangan olahraga;

3

Sasaran ke-3: Meningkatnya Kesetaraan Gender

Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin baik kesetaraan gender suatu wilayah.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah umur harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta pengeluaran konsumsi (mewakili dimensi ekonomi).

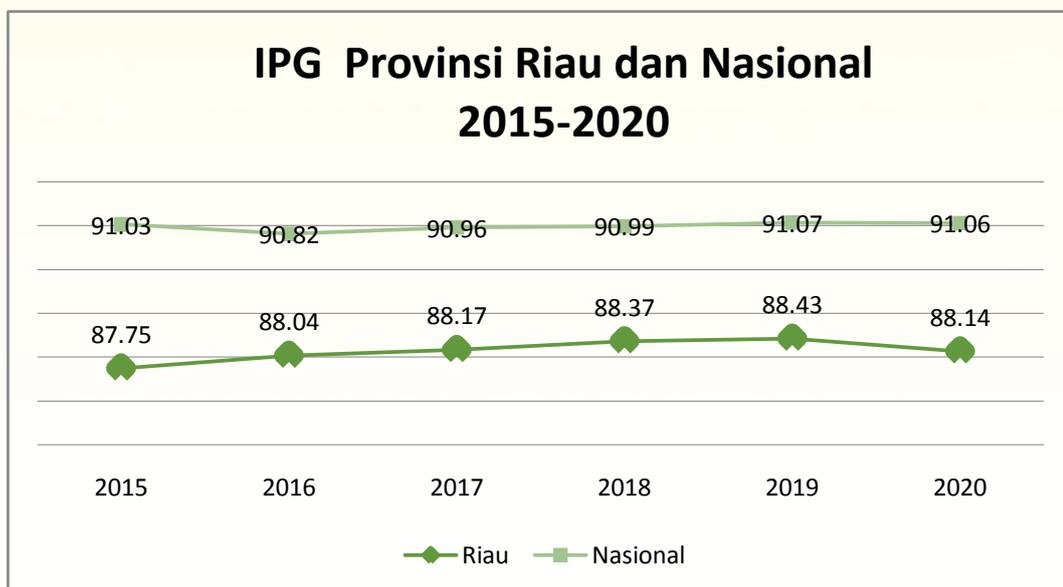
Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kesetaraan gender Provinsi Riau Tahun 2020 dengan indikator IPG sebagai berikut.

Tabel 3.5. Capaian IPG Provinsi Riau tahun 2020 (BPS, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,51	88,14	99,58	90,21	88,14	97,71

Berdasarkan Tabel 3.5 menunjukkan bahwa IPG Provinsi Riau tahun 2020 adalah 88,14 atau 99,58% dari target tahun 2020 yaitu 88,51 (BPS, 2020). Jika dibanding dengan target akhir tahun pada RPJMD, pencapaian ini mencapai 97,71% dari target 90,21.

Jika dibandingkan dengan angka IPG Nasional, IPG Provinsi Riau masih dibawah capaian IPG Nasional. Akan tetapi, secara pertumbuhan, angka IPG Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020 dengan peningkatan sebesar 0,44 persen.



Grafik 3.4. IPG Provinsi Riau dan Nasional 2014-2020 (BPS, 2020)

Beberapa faktor yang mempengaruhi angka IPG Provinsi Riau yaitu dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Dalam pengukuran IPM, indeks kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum angka harapan hidup (AHH) laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Sedangkan untuk nilai minimum AHH laki-laki 17,5 tahun dan perempuan 22,5 tahun. Angka tersebut berdasarkan standar yang ditetapkan UNDP. Hal ini ditunjukkan dengan umur harapan hidup perempuan di Provinsi Riau tahun 2019 yang mencapai 73,43 sedangkan umur harapan hidup laki-laki 69,62.

Dari aspek pendidikan, perhitungan IPG dapat dilihat dari harapan lama sekolah (HLS) penduduk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2019 HLS perempuan adalah 13,40 tahun dan laki-laki sebesar 12,99 persen. Dengan nilai pencapaian tersebut, memperlihatkan bahwa angka harapan lama sekolah perempuan justru lebih tinggi dari laki-laki, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan.

Selain menggunakan angka HLS, kualitas pendidikan juga dapat diukur dengan angka putus sekolah. Angka ini menggambarkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka ini bermanfaat untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan serta keterjangkauan pendidikan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun).

Kendala/permasalahan yang ditemui dalam pencapaian IPG Provinsi Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.
2. Masih tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan kesetaraan gender adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi : Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah; Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilakukan melalui strategi peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan antara lain : Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; Penguatan mekanisme

koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG; Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; serta Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja meningkatnya kesetaraan gender adalah Rp 1.488.762.451,00 dengan realisasi Rp 1.272.094.817,00(85.45%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program sebagai berikut :

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

4 Sasaran ke-4: Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama

Sasaran Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama dilihat dari indikator indeks kerukunan umat beragama. Indeks kerukunan dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Untuk mengukur indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Kemenag Provinsi Riau belum tersedianya data tentang kondisi existing dari ketiga indikator tersebut yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Secara nasional data yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Riau mendapatkan skor kerukunan umat beragama sebesar 68,9. Dengan skor tertinggi secara Nasional sebesar 82,1 sedangkan yang terendah dengan skor 60,2.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kerukunan hidup beragama Provinsi Riau Tahun 2020 dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai berikut.

Tabel 3.6. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau tahun 2020 (Kemenag, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,34	69,26*	94,44	76,92	69,26*	90,04

Keterangan : *) data tahun 2019

Untuk indeks kerukunan umat beragama Provinsi Riau tahun 2019 adalah 68,9 dengan capaian 94,44%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 90,04% dari target yang ditetapkan 76,92. Capaian kinerja indeks kerukunan umat beragama Provinsi Riau tahun 2020 dibawah target akhir RPJMD.

Kendala/Permasalahan dalam peningkatan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penerapan kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial;

2. Belum optimalnya penataan bangunan keagamaan.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan konflik
Upaya dalam rangka peningkatan indeks kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut.

1. Memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
2. Melakukan pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik.
3. Melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan.
4. Memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat (Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, media, dan akademisi).
5. Melakukan upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran tahun 2020 untuk pencapaian kinerja meningkatnya kerukunanhidup umat beragama sebesarRp.29.890.448.205,00dengan realisasi Rp.26.435.653.358,83(88.44%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasikan pada pelaksanaan 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial;
2. Program penataan bangunan dan lingkungan;
3. Program pendidikan politik;
4. Program pengembangan wawasan kebangsaan; dan
5. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

5

Sasaran ke-5: Meningkatnya Pelayanan Transportasi

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Transportasi diukur dari indikator persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara per tahun (%). Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Per Tahun(Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara per tahun (%).	-53,03	-48,304	108,91

Target persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun (%) yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Riau untuk tahun 2020 adalah 0,61%, karena adanya pandemic Covid 19 dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Republik Indonesia menyebabkan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara menurun. Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau menurunkan target Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun (%) pada tahun 2020 menjadi -53,03.

Penurunan tersebut juga karena adanya pemberlakuan PSBB dan PSBM di wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020

tentang larangan mudik, pergerakan orang turun signifikan terutama bila dibandingkan dengan tahun lalu.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, realisasi persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun (%) pada akhir tahun penurunannya sebesar -48,304% dengan capaian sebesar 108,91%.

Perhitungan tersebut diperoleh dari persentase jumlah penumpang naik dan turun, jumlah barang yang dimuat, jumlah barang yang dibongkar pada pelabuhan, bandara, dan terminal di Provinsi Riau pada tahun 2020 dikurangi dengan jumlah penumpang naik dan turun, jumlah barang yang dimuat, jumlah barang yang dibongkar pada pelabuhan, bandara, dan terminal di Provinsi Riau pada tahun 2019. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.8. Jumlah Pergerakan Orang/Barang Tahun 2020

No.	Simpul Transportasi	Domestik dan Internasional			
		Jumlah Pnp Naik (Orang)	Jumlah Pnp Turun (Orang)	Jumlah Barang Muat (Ton)	Jumlah Barang Bongkar (Ton)
1	Pelabuhan	1,459,337.50	1,265,473.00	137,591,856.17	75,740,559.84
2	Bandara	665,971.00	699,178.00	4,584.12	12,932.94
3	Terminal	772,758.00	390,787.00	-	-
Total		2,898,066.50	2,355,438.00	137,596,440.28	75,753,492.78
Total pergerakan orang (org)/ Total pergerakan barang(ton)		5,253,504.50		213,349,933.07	

Tabel 3.9. Jumlah Pergerakan Orang/Barang Tahun 2019

No.	Simpul Transportasi	Domestik dan Internasional			
		Jumlah Pnp Naik (Orang)	Jumlah Pnp Turun (Orang)	Jumlah Barang Muat (Ton)	Jumlah Barang Bongkar (Ton)
1	Pelabuhan	2,528,638.00	2,210,596.00	275,183,712.33	151,481,119.69
2	Bandara	1,762,646.00	1,788,251.00	5,541.36	13,152.68
3	Terminal	1,393,275.00	156,313.00	-	-
Total		5,684,559.00	4,155,160.00	275,189,253.70	151,494,272.36
Total pergerakan orang (org)/ Total pergerakan barang(ton)		9,839,719.00		426,683,526.06	

% orang	(46.61)	*total pergerakan orang tahun 2020 – 2019/total pergerakan orang tahun 2019 * 100%
% barang	(50.00)	*total pergerakan barang tahun 2020 – 2019/total pergerakan barang tahun 2019 * 100%
% kenaikan rata-rata	-48.304	*rata-rata persentase orang dan persentase barang

Data – data diatas diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti Angkasa Pura untuk Bandara, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri untuk Terminal Tipe A dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk Pelabuhan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pencapaian Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun (%) adalah dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pergerakan orang/barang sesuai dengan protokol kesehatan.

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja adalah dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pada tahun 2020, akibat adanya pembatasan sosial berskala besar.

Solusi untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan protokol kesehatan dan peningkatan pelayanan transportasi berbasis teknologi informasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun (%) pada tahun 2020 sebesar Rp.505.666.417.558,20 dengan realisasi Rp. 450.347.459.577,68 (89.06%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasi dalam bentuk pelaksanaan 5 (lima) program pendukung yaitu :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan;
2. Program preservasi jalan dan jembatan;
3. Program perhubungan laut;
4. Program bina sistem transportasi; dan
5. Program perhubungan darat.

6

Sasaran ke-6: Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman

Pembangunan infrastruktur permukiman merupakan amanat yang diemban bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan urusan wajib yang

menjadi kewenangan Provinsi adalah penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi.

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melakukan upaya peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman melalui penyediaan air minum dan sanitasi layak. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak merupakan indikator kunci yang menjadi acuan dalam mengukur kualitas hidup masyarakat. Kedua indikator ini termasuk dalam indikator yang diperhitungkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman dengan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan air minum dengan target 71,84% pada tahun 2020 dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dengan target 78,21%.

a. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum

Perhitungan air minum layak dihitung dari sumber air minum (sumur bor/pompa) dengan jarak ke tempat pembuangan limbah minimal 10 meter.

Klasifikasi air minum aman terdiri dari beberapa tingkatan antara lain bersumber dari air minum layak, mudah diakses, tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis air minum. Pengertian air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding; sumur bor atau sumur pompa; sumur terlindung; mata air terlindung; dan air hujan. Untuk konsumsi air minum rumah tangga menggunakan air kemasan bermerk atau air isi ulang, sedangkan untuk keperluan mandi/cuci/dll. menggunakan sumber air *leding*, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2019).

Capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dapat dilihat dari Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum (BPS, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	71.84	88.25	122,84	78.82	88.25	111.96

Dari Tabel 3.10 menunjukkan bahwa realisasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum tahun 2020 adalah 88,25% dengan capaian kinerja sebesar 122,84%.Capaian tersebut dipengaruhi oleh sumber air minum yang diperoleh oleh masyarakat diantaranya air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung dan mata air tak terlindung. Sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah yang berasal dari air isi ulang dengan persentase 50,78%, sumur bor/pompa 15,41% dan sumur terlindung 10,67%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum tahun 2020 mencapai 111,96% dari target yang ditetapkan (78,82%).

Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 88,25% dimana masih dibawah capaian Nasional yakni 90,21% (BPS, 2020).

Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum Provinsi Riau 2015-2020 menunjukkan tren peningkatan secara signifikan pada tahun 2017-2019, sedangkan pada tahun 2016-2017 menunjukkan penurunan, secara rinci dijelaskan pada Grafik halaman berikut:



Grafik 3.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Provinsi Riau 2015-2020 (BPS, 2020)

Berdasarkan Grafik 3.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2017 tidak terjadi peningkatan secara signifikan hanya sebesar 1,18%, sedangkan tahun 2017-2020 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 17,48%.

Kendala/permasalahan yang mempengaruhi ketercapaian Indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya ketersediaan sumber air bersih pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2. Persentase cakupan pelayanan air minum dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
3. Tidak tersedianya investasi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pelayanan mengakibatkan belum optimalnya pelayanan air minum di Provinsi Riau.
4. Kebutuhan dana belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, sehingga pelaksanaan fisik tidak berkesinambungan serta sangat rentan terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan pada bangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui:

1. Pengembangan SPAM Regional untuk mendukung capaian air minum khususnya bagi Kabupaten/Kota yang kesulitan air baku mengingat sumber air baku terdapat pada beberapa sungai besar (Rokan, Kampar dan Indragiri) dan anak-anak sungainya yang mengalir banyak wilayah;
2. Peningkatan kinerja PDAM dan UPT Air Minum;
3. Menetapkan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang penyediaan air bersih.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Riau sehingga mendapat dukungan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan dan tepat guna;

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program Penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan sebesar Rp 38.295.286.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.35.302.980.160,39 (92,19%).

b. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman juga diukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Fasilitas sanitasi rumah tangga diklasifikasikan layak, jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang digunakan hanya oleh Anggota Rumah Tangga (ART) sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Seperti halnya klasifikasi air minum layak, indikator ini juga mengalami pengembangan di tahun 2019. Pada pengembangan tersebut, termasuk pula klasifikasi sanitasi layak khusus pada rumah tangga yang tinggal di pedesaan. Jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa namun tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan lubang tanah (BPS, 2019).

Capaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dapat dilihat dari Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (BPS, 2020)

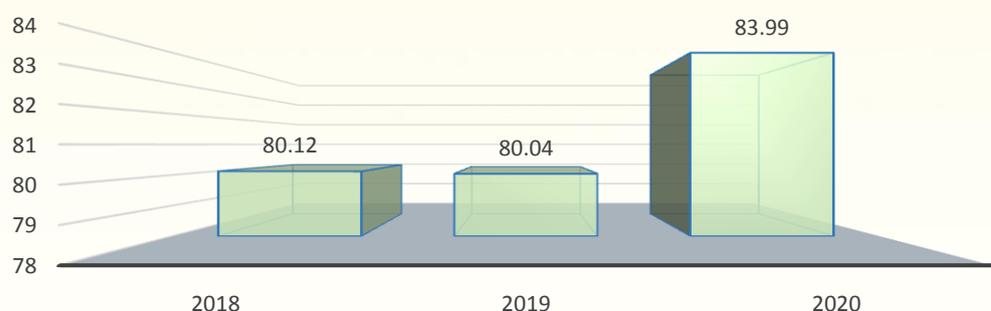
Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	78.21	83.99	107.39	80.29	83.99	104.61

Dari Tabel 3.11 diatas menunjukkan bahwa realisasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Provinsi Riau tahun 2020 adalah 83,99% dengan capaian kinerja sebesar 107.39% dari target yang telah ditetapkan (78,21%). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai 104.61% dari target yang ditetapkan 80,29%.

Jika dibandingkan dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak secara Nasional 79,53%, maka Provinsi Riau melebihi capaian Nasional 83,99%.

Tren persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak dari tahun 2018-2020 meningkat. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 2018-2020



Grafik 3.6. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi Layak Provinsi Riau 2018-2020 (BPS, 2020)

Dari Grafik 3.6 diatas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Riau 2019-2020 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 4,94%. Terjadinya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dipengaruhi oleh adanya beberapa

program Pemerintah Provinsi Riau seperti PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat); Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Provinsi Riau; Pembinaan teknis sektor air minum dan sanitasi; pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya sanitasi pribadi di rumah tangga.

PAMSIMAS merupakan program berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak lebih berfokus pada daerah perdesaan, daerah terpencil, dan pulau terluar Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar Rp.11.227.243.867,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.318.694.589,00 (91,91%) melalui Program penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan. Realisasi anggaran sebesar 91,91% juga dipengaruhi oleh terdapatnya 6.291 m2 lahan peruntukan TPA yang belum dibayarkan karena alasan administrasi. Sementara dari program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman alokasi anggaran sebesar Rp 9.261.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.383.404.083,45 (79,72%).

7

Sasaran ke-7: Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga

Energi listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial, maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri. Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi

listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumberdaya tak terbarui ketersediaannya semakin terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber energi listrik perlu diupayakan langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dan terjangkau.

Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga diukur melalui indikator rasio elektrifikasi (%). Rasio Elektrifikasi (RE) adalah persentase rumah tangga atau Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan akses energi listrik dibandingkan dengan seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada dalam suatu wilayah. Perumusan perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah KK yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah KK se – Provinsi Riau}} \times 100\%$$

Capaian kinerja rasio elektrifikasi Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Rasio Elektrifikasi (Dinas ESDM Provinsi Riau, 2020)

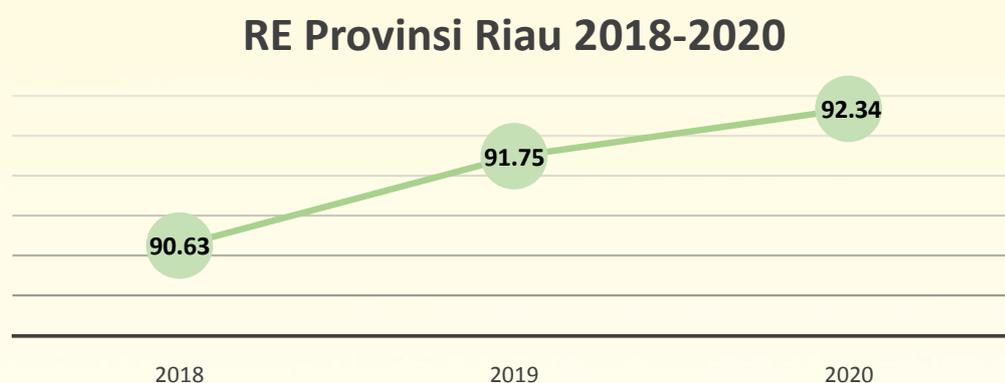
Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio Elektrifikasi	92.85	92.34	99.45	97.43	92,34	94,78

Berdasarkan tabel 3.12 diatas menunjukkan bahwa realisasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau tahun 2020 adalah 92,34, jika dibandingkan

dengan target tahun 2020 sebesar 92,85 sehingga capaian kinerja sebesar 99,45%.

Realisasi Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau tahun 2020 (92,34) jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 97,43 sehingga capaian kinerja sebesar 94,78%.

Capaian persentase Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau 2018-2020 menunjukkan tren peningkatan, secara rinci dijelaskan pada Grafik berikut.



Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau 2018-2020

Dari Grafik 3.7 menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sebesar 1,71 persen. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan instansi terkait (PLN) dalam meningkatkan infrastruktur jaringan listrik untuk wilayah di Provinsi Riau.

Pada Triwulan IV tahun 2020, Rasio Elektrifikasi Nasional mencapai 99,20%. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional adalah dengan menjalankan program memberikan akses listrik terhadap 433 desa belum berlistrik melalui perluasan jaringan, pembangunan *minigrid*, dan program tabung listrik.

Berdasarkan data di atas, masih terdapat sekitar 7,66% rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan listrik. Hal ini terjadi karena hal-hal sebagai berikut.

1. Aksesibilitas pada beberapa daerah yang sulit dijangkau sehingga menghambat percepatan pembangunan jaringan listrik.
2. Pertumbuhan kawasan penduduk di desa-desa yang masih belum teraliri listrik di Provinsi Riau.
3. Belum optimalnya pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat miskin.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Rencana Umum Energi (RUED) Provinsi Riau dan melakukan Penyusunan DED/FEED Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan.
2. Melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat untuk daerah-daerah 3T yang masih jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN dan belum akan berlistrik PLN lima tahun ke depan.
3. Melakukan pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* (SHS) untuk daerah-daerah 3T yang masih jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN dan belum akan berlistrik PLN lima tahun ke depan.
4. Memverifikasi desa-desa yang belum teraliri listrik dan mengusulkan kegiatan pembangunan jaringan listrik di desa yang belum dialiri listrik.
5. Melakukan kegiatan pembangunan jaringan listrik dan pemasangan Kwh gratis untuk masyarakat miskin.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tanggasebesarRp.10.431.013.912,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.270.556.120,00(60,11%) melalui Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan.Rendahnya realisasi anggaran tersebut

dikarenakan adanya kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau yang realisasinya relatif rendah yaitu sebesar 49,08%. Hal ini disebabkan dari 2 (dua) lokasi pembangunan PLTS yang ditargetkan hanya terlaksana 1 (satu) lokasi yaitu Pembangunan PLTS di Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan untuk PLTS di Kabupaten Indragiri Hulu tidak bisa dilaksanakan oleh keterlambatan proses lelang.

8

Sasaran ke-8: Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang.

Sasaran meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air diukur melalui persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik (%). Capaian kinerja persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik sebagaimana dijelaskan pada halaman berikut:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi dengan Baik

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	29.43	21,04	71,49	29.30	18.64	71,81

Berdasarkan Tabel 3.13 diatas menunjukkan bahwa realisasi lahan pertanian yang teririgasi dengan baik di Provinsi Riau tahun 2020 adalah 21,04 persen. Lahan irigasi terdiri dari daerah irigasi dan daerah irigasi rawa yang tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau dengan Luas Baku daerah irigasi seluas 10.035 ha dan luas baku daerah irigasi rawa seluas 106.936 ha. Sedangkan luas lahan fungsional (yang difungsikan) pada daerah irigasi 1.765 ha dan daerah irigasi rawa seluas 22.842 ha. Sehingga persentase dari total daerah irigasi sawah/rawa yang difungsikan dari luas seluruh lahan irigasi yang ada yaitu 21,04%.

Luas lahan fungsional (lahan irigasi/rawa) tersebut merupakan lahan yang dipergunakan dan dipelihara sarana prasarana irigasinya, seperti pemeliharaan bendungan, saluran dan pintu-pintu air. Pemeliharaan dilakukan secara rutin, berkala dan rehabilitasi.

Dari pencapaian target kinerja persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik (%) tahun 2020 yaitu 21,04% dari target 29,43% dengan capaian kinerja sebesar 71,49%, masih belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja tersebut perlu diprioritaskan kegiatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan daerah irigasi/daerah irigasi rawa kewenangan provinsi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya mencapai 71,81% dari target yang ditetapkan yaitu 29,30. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun lalu,

dikarenakan merupakan sasaran dan indikator baru yang terdapat pada RPJMD Provinsi Riau 2019-2024.

Beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik adalah sebagai berikut.

1. Belum terlaksananya serah terima aset irigasi dan Rawa Kewenangan Provinsi
2. Infrastruktur dalam Pembangunan dan Perbaikan belum sesuai dengan kebutuhan (Keterbatasan Dana/Anggaran)
3. SDM Irigasi (Tenaga OP Irigasi dan Rawa) yang masih terbatas
4. Meningkatnya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian
5. Belum dibentuk Komisi Irigasi dan Perda Irigasi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik adalah sebagai berikut.

1. Pemeliharaan secara rutin dan berkalamelalui pengamanan jaringan irigasi, pembuangan lumpur di bangunan dan saluran, perbaikan bendung, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya,
2. Melakukan perbaikan saluran, perbaikan pintu-pintu dan skot balk, perbaikan jalan inspeksi dan perbaikan fasilitas pendukung.

Sedangkan langkah ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan serah terima aset irigasi dan rawa Kewenangan Provinsi Riau
2. Melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Riau
3. Menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan lahan yang adamelalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Menetapkan kebijakan terkait Irigasi di Provinsi Riau dan pembentukan Komisi Irigasi

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air sebesar Rp. 8.643.662.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.124.542.422,47 (82,43%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

9

Sasaran ke-9: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Kualitas lingkungan hidup diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

IKLH diukur melalui 4 (empat) indeks, yaitu Indikator Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Indikator Kualitas Air Laut belum termasuk dalam indikator pada RPJMD Provinsi Riau 2019-2024.

a. Indikator Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index / WQI*) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi (Laporan IKLH Nasional, 2019).

Parameter yang dijadikan dasar acuan perhitungan IKA yaitu zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS), oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), kandungan fosfat (Total Phosphat), Fecal Coliform, dan Total Coliform.

Capaian Indeks Kualitas Air Provinsi Riau tahun 2020 sebagai berikut.

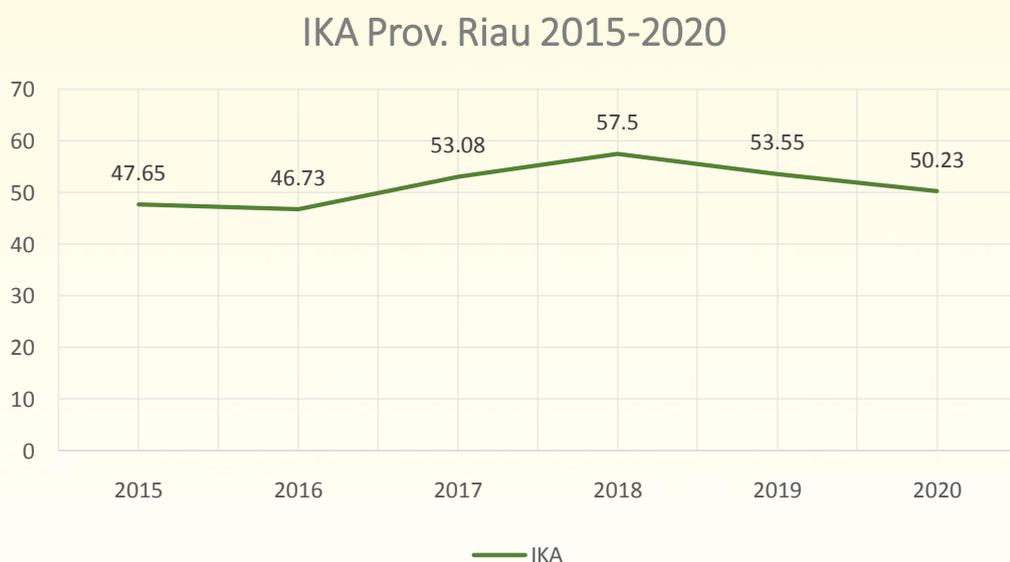
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	58.30	50.23	86.16	59.20	50.23	84.85

Dari Tabel 3.14 menunjukkan bahwa indeks kualitas air Provinsi Riau tahun 2020 adalah 50,23 dengan capaian kinerja 86,16% telah melebihi target kinerja tahun 2020 (58,30). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai 84,85% dari target yang ditetapkan (59,20). Akan tetapi realisasi kinerja Indeks Kualitas Air Provinsi Riau tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKA Nasional karena data IKA Nasional Tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rendahnya capaian terhadap indikator indeks kualitas air dipengaruhi oleh penurunan kualitas air dari empat sungai besar yang ada di Provinsi Riau, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Kampar, yang disebabkan masih adanya perusahaan yang membuang limbah ke badan air yang melebihi baku mutu yang ditetapkan dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sungai terutama masyarakat di pinggiran sungai.

Perkembangan IKA Provinsi Riau tahun 2015-2020 dapat dilihat dari Grafik berikut.



Grafik 3.8. IKA Provinsi Riau tahun 2015-2020 (Kementerian LHK, IKLH 2019)

Berdasarkan Grafik 3.8 menunjukkan bahwa IKA mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2020, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 turun pada angka 53,55 pada tahun 2019 dan 50,23 pada tahun 2020.

Kendala/permasalahan yang menyebabkan menurunnya indeks kualitas air di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Masih tingginya perusahaan yang membuang limbah ke badan sungai.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sungai terutama masyarakat di pinggiran sungai.

Upaya yang telah dilakukan terkait pengelolaan kualitas air sungai adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan Kualitas air sungai dan danauserta melaksanakan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap perusahaan kewenangan provinsi dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran air (PPA), pengendalian pencemaran Udara (PPU), pengelolaan LB3, pelaksanaan dokumen lingkungan, dan pelaksanaan pengawasan izin lingkungan
2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, meliputi Pemantauan konservasi sempadan sungai/danau/pantai dan kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian);
 - a. Memastikan adanya wilayah *green-belt* pada perusahaan bidang kehutanan
 - b. Memastikan adanya wilayah lindung pada sempadan sungai di perusahaan bidang perkebunan
 - 1) melaksanakan pemantauan wilayah sempadan sungai pada perusahaan perkebunan
3. Memberikan penyuluhan agar di wilayah sempadan sungai ditanami dengan tanaman kehutanan dan tidak menggunakan bahan kimia (pupuk maupun herbisida)

b. Indikator Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan.

Pemantauan dilakukan di 4 (empat) area per kabupaten/kota yaitu area transportasi, area industri, area perkantoran/komersil dan area pemukiman dengan frekuensi pemantauan 2 (dua) kali per tahun yang mewakili musim panas dan musim hujan. Dari keseluruhan parameter kualitas udara ambien, untuk keperluan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya memantau 2 (dua) parameter yaitu Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Provinsi Riau tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

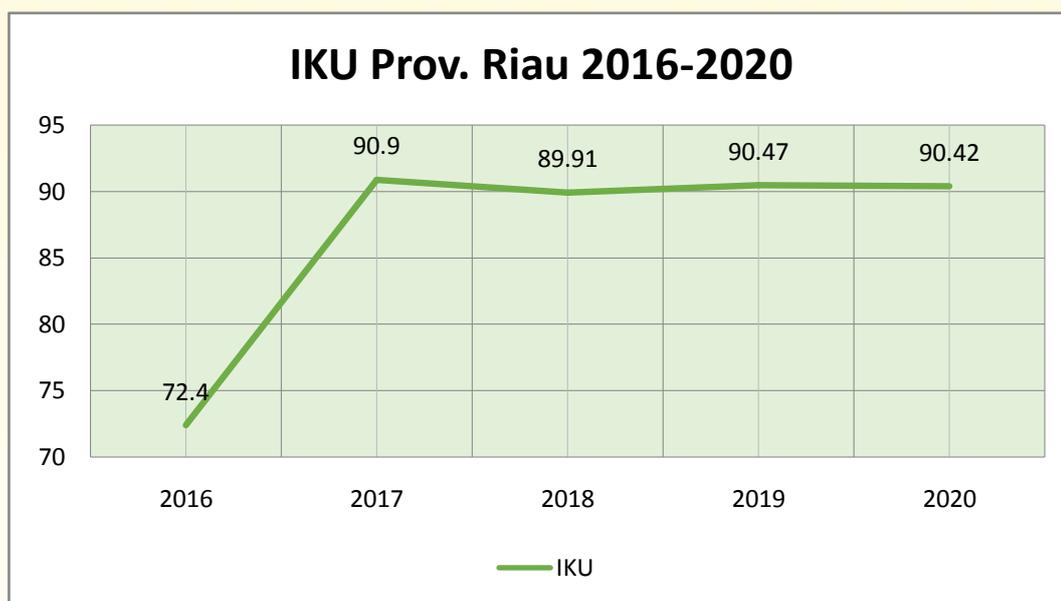
Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	90.30	90.42	100.13	91.60	90.42	98.71

Dari Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa indeks kualitas udara Provinsi Riau tahun 2020 adalah 90,42 dengan capaian kinerja 100,13% telah melebihi target kinerja tahun 2020 (90,30). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian kinerja tahun 2020 telah mencapai 98,71% dari target yang ditetapkan (59,20). Akan tetapi realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara Provinsi Riau tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU Nasional karena data IKU Nasional Tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indeks Kualitas Udara dipengaruhi oleh tingkat pencemaran akibat kebakaran hutan dan lahan. Tercatat pada tahun 2020 jumlah titik api (*hotspot*) di Provinsi Riau mencapai 2.734 titik yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan titik api terbanyak berada pada Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Luas lahan

terbakar mencapai 1.603,95 ha, Kabupaten/Kota dengan lahan terluas yang terbakar adalah Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Siak (BPBD Provinsi Riau, 2020).

Perkembangan IKU Provinsi Riau tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik berikut.



Grafik 3.9. IKU Provinsi Riau tahun 2015-2020 (Kementerian LHK, 2020)

Jika dilihat dari Grafik 3.9 di atas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara di Provinsi Riau pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan dengan angka penurunan hanya sebesar 0,05 poin.

Kendala/permasalahan yang menyebabkan menurunnya indeks kualitas udara di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Masih eerdapatnya aktifitas pembakaran untuk pembukaan lahan.
2. Relatif tingginya angka titik api (*hotspot*) di Provinsi Riau
3. Realatif tingginya luas lahan terbakar di Provinsi Riau terutama di daerah-daerah perkebunan sawit.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan indeks kualitas udara adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan terhadap perusahaan kewenangan provinsi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran Udara (PPU), pelaksanaan dokumen lingkungan, kesiapsiagaan KARHUTLA.
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan alat pemantau kualitas air dan udara sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Udara melalui revitalisasi dan pemeliharaan *sparepart* alat pemantau;
 - b. Melakukan perbaikan pemeliharaan dan revitalisasi alat pemantau kualitas udara ambien
3. Melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah rawan karhutla
4. Melakukan monitoring peralatan pemadaman dalam upaya kesiapsiagaan karhutla
5. Melakukan sosialisasi pencegahan karhutla di daerah rawan karhutla.

c. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan

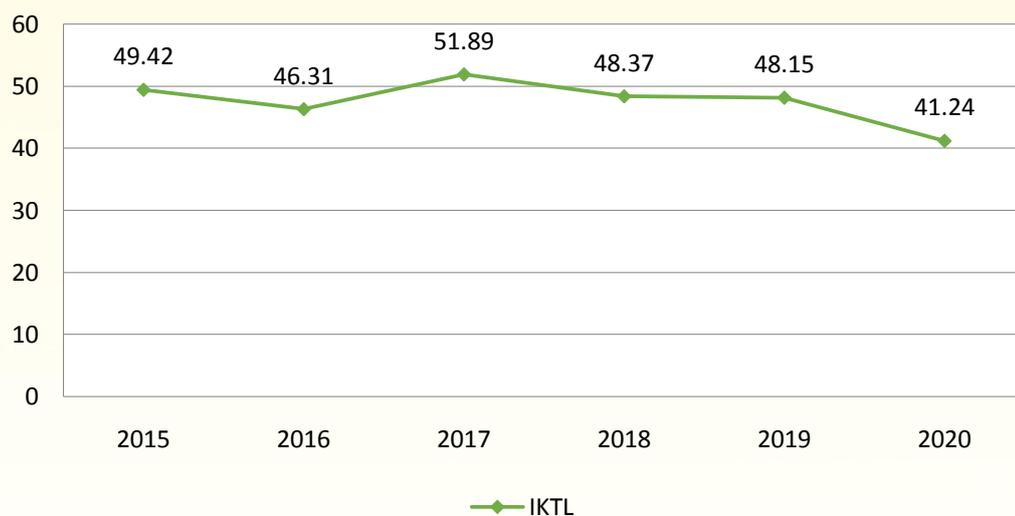
Luas tutupan hutan yang dihitung adalah seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis citra *landsat*, dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten/Kota. Angka luas tutupan lahan dikonversi ke dalam bentuk indeks tutupan hutan (ITH).

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57.59	41.24	71.61	59.59	41.24	69.21

Berdasarkan Tabel 3.16 diatas menunjukkan bahwa realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Riau tahun 2020 adalah 41,24 dengan capaian kinerja sebesar 71,61%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 capaian kinerja tahun 2020 mencapai 69,21%. Rendahnya capaian kinerja tahun 2020 dipengaruhi oleh masih tingginya lahan kritis Provinsi Riau yang mencapai ± 53.289 Ha (DLHK Provinsi Riau, 2020). Akan tetapi realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara Provinsi Riau tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi IKU Nasional karena data IKU Nasional Tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IKTL Provinsi Riau 2015-2020



Grafik 3.10. IKTL Provinsi Riau tahun 2015-2020(Kementerian LHK, 2020)

Berdasarkan Grafik 3.10 diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap IKTL sejak tahun 2015 hingga 2020 dengan penurunan sebesar 8.18 poin. Dan pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup besar, terhadap IKTL Provinsi Riau sebesar 6,91 poin dari capaian IKTL tahun 2019.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja indeks kualitas tutupan lahan adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya konversi kawasan hutan untuk sektor lain di luar sektor kehutanan seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunan, dan transmigrasi;
- 2) Pengelolaan hutan yang tidak lestari atau tidak menerapkan sertifikasi kelestarian hutan yang dikenal sebagai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sistem lacak balak (*chain of custody*);
- 3) Pencurian kayu atau penebangan liar;
- 4) Perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan; serta
- 5) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Upaya yang dilakukan terkait pengelolaan kualitas tutupan lahan adalah sebagai berikut.

- 1) Upaya pemulihan (restorasi) dalam upaya penambahan tutupan lahan pada beberapa lokasi melalui kegiatan
 - Revegetasi 37,5 ha melalui Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut Secara Berkelanjutan di Indonesia (*Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia/SMPEI*) di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
 - Revegetasi melalui restorasi gambut di lahan bekas terbakar melalui kegiatan Tugas Pembantuan
- 2) Pemantauan luas tutupan hutan dan pengendalian perubahan tutupan hutan
 - a. Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan
 - b. Memastikan adanya wilayah lindung pada perusahaan bidang kehutanan
 - c. Memastikan adanya wilayah *high conservation value (HCV)* pada perusahaan bidang perkebunan

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebesar Rp.16.222.743.446,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.351.775.875,00 (76.14%). Penggunaan anggaran tersebut direalisasikan pada pelaksanaan 4 (empat) program pendukung yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pemanfaatan dan penggunaan kawasan Hutan;
3. Program pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
4. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

10 Sasaran ke-10: Menurunnya emisi gas rumah kaca

Sasaran Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca diukur melalui Indikator Emisi Gas Rumah Kaca (GgCO₂-e). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terdiri dari Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄), *Dinitrogen Mono Oksida* (N₂O), *Hidro Fluorocarbon* (HFCs), *Sulfur Hexaflorida* (SF₆), *Perfluoro Karbon* (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya. Perhitungan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui inventarisasi GRK.

Inventarisasi GRK menjadi hal yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Tingkat emisi GRK Provinsi Riau tidak mengindikasikan semua kategori emisi GRK karena hanya dihitung berdasarkan sektor-sektor yang dipantau. Masih terdapat sektor-sektor lain yang tidak terpantau melalui inventarisasi karena keterbatasan data aktifitas. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi maupun rosot yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian

melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi ini hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Perhitungan emisi dan serapan GRK menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Emisi/Penyerapan GRK} = \text{AD} \times \text{EF}$$

GRK : Gas Rumah Kaca
AD : *Activity Data*
EF : *Emission Factor*

AD (*Activity Data*) yaitu data kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia yang menghasilkan emisi atau serapan GRK. Sedangkan EF adalah faktor emisi atau serapan GRK, yang menunjukkan besarnya emisi/serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan.

Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memantau dan menghitung tingkat dan status GRK dari berbagai sumber emisi (*sources*) dan penyerapannya (*sink*) akibat kegiatan manusia (*antropogenik*). Emisi GRK dihasilkan secara alami dan dari berbagai kegiatan pembangunan terutama dari kegiatan di bidang kehutanan, lahan gambut, limbah, pertanian, transportasi, industri, dan energi.

Perhitungan emisi gas rumah kaca dilihat dari emisi yang berasal dari sektor energi yang meliputi : industri lainnya; minyak dan gas bumi; Batu bara; pemukiman dan perkantoran; transportasi; manufaktur; konstruksi; Industri dan Penggunaan Produk (IPP).

Sektor pertanian berasal dari beberapa kegiatan, meliputi; peternakan; pengelolaan lahan; pemakaian kapur; pemakaian urea; N₂O langsung dan tak langsung dari pengolahan tanah; dan CH₄ dari budidaya padi sawah, kehutanan dan limbah.

Kegiatan inventarisasi GRK di Provinsi Riau dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, di mana inventarisasi dan perhitungan emisi GRK nasional dengan basis elektronik - online dan informasi teknologi (IT) tersebut dinamakan *System Inventory* GRK Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas Dan Transparan (SIGN-SMART), yang telah dimutakhirkan oleh KLHK pada awal tahun 2018. SIGN-SMART ini merupakan penyederhanaan dari metodel PCC (*International Panel on Climate Change*) yang dapat diakses secara luas baik nasional dan internasional.

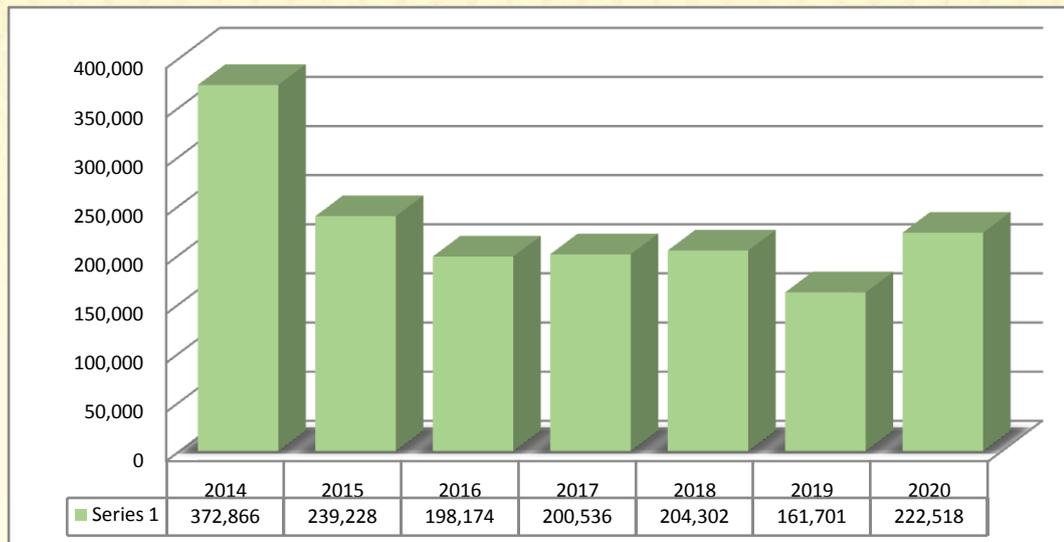
Capaian kinerja emisi menurunnya gas rumah kaca disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Emisi Gas Rumah Kaca

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (GgCO ₂ -e)	343.988	222.518	135,31	282.075	222.518	121,11

Berdasarkan Tabel 3.17 menunjukkan bahwa Emisi gas rumah kaca (GgCO₂-e) Provinsi Riau Tahun 2020 mencapai 222.518 GgCO₂e dengan capaian 135,31%, artinya melebihi target yang telah ditetapkan (343.988). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2020 telah mencapai target 282.075 dengan persentase capaian sebesar 121,11%. Akan tetapi realisasi kinerja Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Emisi Gas Rumah Kaca Nasional karena data Nasional Tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perkembangan emisi gas rumah kaca Provinsi Riau tahun 2014-2020 disajikan dalam grafik halaman berikut.



Grafik 3.11. Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau tahun 2014-2020(DLHK Provinsi Riau, 2020)

Berdasarkan Grafik 3.11 menunjukkan bahwa emisi GRK Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun 2014-2019, akan tetapi terjadi peningkatan emisi GRK dari tahun 2019-2020. Meningkatnya angka emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya emisi yang berasal dari limbah Biodiesel (B20) yang dihasilkan dari tanah gambut berada di atas minyak diesel (solar) yang memiliki emisi 3,14 kgCO₂eq./liter. Disamping itu, peningkatan laju emisi juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya restorasi ekosistem untuk perbaikan tutupan lahan dan pengendalian ancaman bencana dengan berbasis masyarakat.
2. Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penerapan Bank Sampah (BS).
3. Belum terlaksananya perizinan melalui skema Perhutanan Sosial dan perdagangan karbon (*carbon trade*) bagi membuka akses dan peluang

kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk hak kelola bagi masyarakat hukum adat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menurunkan angka Emisi Gas rumah kaca adalah sebagai berikut:

1. Restorasi ekosistem dalam pemanfaatan SDA dan Jasa lingkungan. Restorasi lahan gambut dan RHL untuk perbaikan tutupan lahan dan pengendalian ancaman bencana dengan berbasis masyarakat
2. Mengefektifkan penanganan konflik pemanfaatan SDA dan kawasan hutan untuk membuka akses legal bagi masyarakat dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan
3. Mengembangkan perizinan melalui skema Perhutanan Sosial dan perdagangan karbon (*carbon trade*) bagi membuka akses dan peluang kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk hak kelola bagi masyarakat hukum adat;
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi melalui satgas Brigdalkarhutla.
5. Melaksanakan adaptasi dan mitigasi dalam Program Kampung Iklim.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran untuk pencapaian kinerja penurunan emisi gas rumah kaca melalui Program perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar Rp.13.474.791.058,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.894.728.290,- atau 36.33%. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tidak dilaksanakan akibat pihak penyedia/kontraktor pengadaan alat pemadam karhutla wanprestasi sehingga paket pekerjaannya tidak terlaksana.

11

Sasaran ke-11: Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan

Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak bergantung kebutuhan ekonomi kepada orang lain. Kemandirian ekonomi dipengaruhi oleh banyak indikator salah satunya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dimana PDRB ADHK dipengaruhi oleh kontribusi beberapa sektor antara lain pertanian, pertambangan, industri, jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, dan jasalainnya.

Kesenjangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat (Smith dan Todaro, 2006). Menurut Arsyad (2010) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan dalam suatu daerah yaitu sebagai berikut: pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita; inflasi; ketidakmerataan pembangunan antar daerah; dan rendahnya mobilitas sosial, orbitasi (jarak desa ke ibukota kecamatan, jarak kecamatan ke ibukota kabupaten). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antara lain : Distribusi Ukuran; Kurva Lorenz; dan Indeks Gini (Koefisien Gini), sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau sesuai dengan RPJMD 2019-2024 adalah indikator Koefisien Gini.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Dan Menurunnya Kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Nilai PDRB ADHK dalam Juta Rupiah (BPS, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	Nilai PDRB ADHK (Juta Rupiah)	500.882.707,-	490.024.473,-	97.83	540.867.400,-	490.024.473,-	90.60

Berdasarkan Tabel 3.18 diatas menunjukkan bahwa realisasi Nilai PDRB ADHK Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp 490.024.473,00 Juta dari target Rp. 500.882.707,00 Juta Rupiah atau 97,83%. Pencapaian ini lebih rendah pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 495.598.101,00. Capaian Kinerja Nilai PDRB ADHK masih rendah daripada target akhir yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD yaitu Rp.540.867.400,00. Atau baru mencapai 90,60% dari target akhir RPJMD.

PDRB ADHK yang merupakan indikator dari kondisi ekonomi sebuah daerah ini terdiri dari beberapa lapangan usaha yang mendorong naik maupun turunnya nilai PDRB ADHK. Rincian Lapangan Usaha yang mendorong Nilai PDRB ADHK dapat dilihat dari Tabel 3.19 halaman berikut:

Tabel 3.19. Nilai PDRB ADHK Provinsi Riau per Lapangan Usaha Tahun 2020 (BPS Provinsi Riau, 2020)

	Lapangan Usaha	Triwulan IV-2019	Triwulan III- 2020	Triwulan IV-2020	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)		
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33,42	35,10	34,45	129,68	135,31
B.	Pertambangan dan Penggalian	20,94	19,22	19,81	85,62	80,01
C.	Industri Pengolahan	39,36	40,27	39,36	153,15	156,11
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,09	0,32	0,37
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,07	0,07
F.	Konstruksi	11,68	10,23	11,11	42,90	41,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,54	10,60	11,51	48,43	42,61
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,08	0,77	0,81	4,24	3,20
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,61	0,46	0,50	2,34	1,82
J.	Informasi dan Komunikasi	1,23	1,36	1,36	4,73	5,32
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17	1,20	1,24	4,59	4,78
L.	Real Estat	1,17	1,21	1,22	4,60	4,69
M,N.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,18	2,13	2,17	8,60	8,31
P.	Jasa Pendidikan	0,66	0,70	0,68	2,53	2,59
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,32	0,30	1,02	1,18
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,75	0,49	0,65	2,74	2,12
Produk Domestik Regional Bruto		127,16	124,17	125,29	495,60	490,02

Pada tahun 2020 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,62 persen terhadap perekonomian Nasional. Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

Struktur perekonomian Riau dari sisi produksi tahun 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (156,11 triliun rupiah); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (135,31 triliun rupiah); dan Pertambangan dan Penggalan (80,01 triliun rupiah).

Permasalahan utama capaian nilai PDRB ADHK Provinsi Riau dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19, Beberapa sektor mengalami penurunan seperti turunnya angka penjualan mobil, dan motor secara ritel, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan perdagangan yang disebabkan oleh lesunya perekonomian, serta pembatasan jam operasional perdagangan.

Berbeda dengan sektor lainnya, penurunan yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan, bukan disebabkan langsung oleh pandemik. Sektor ini sudah mulai dialihkan ke sektor Industri Pengolahan, karena pada sektor ini terjadi penurunan produksi minyak mentah secara alami (*natural declining*) dari sumur-sumur tua yang berujung pada minimnya investasi pengeboran.

Terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang tidak terkena dampak oleh adanya Covid-19, bahkan cenderung mengalami peningkatan, seperti sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi.

Pada sektor Jasa Pendidikan dan sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan karena dengan adanya kebijakan pembatasan sekolah tatap muka, sektor pendidikan mulai berinovasi didalam memberikan pelayanan, dimana mulai bertumbuhnya penyedia jasa pendidikan swasta yang menyediakan pendidikan tambahan diluar jam sekolah, atau bimbingan belajar secara daring maupun *home to home*.

Kebijakan *School From Home*, *Work From Home*, dan ajakan untuk “DirumahAja”.

Pada sektor Informasi dan Komunikasi oleh karena kebijakan PSBB, kebutuhan penggunaan jaringan komunikasi menjadi lebih intens, sehingga mampu meningkatkan investasi maupun omset dari sektor Informasi dan Komunikasi ini.

Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Riau mulai membaik pada kuartal III dan IV, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PDRB ADHK pada Triwulan III sebesar Rp.124.353.046,00 dan Triwulan IV sebesar Rp.125.287.162,00 hal ini dikarenakan adaptasi pemerintah terhadap pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan pencabutan PSBB dan menerapkan gaya hidup baru (*New Normal*), yang memberikan kesempatan disegala sektor untuk memulihkan produktifitas dan kinerjanya.

Meskipun tidak semua sektor berhasil meningkatkan pertumbuhan nilai PDRB ADHK, namun Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya didalam meningkatkan nilai akumulasi PDRB ADHK, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mengalihkan Basis struktur PDRB yang semula dari Pertambangan dan Penggalian ke Industri Pengolahan, melalui pengembangan Sentral Industri Kecil Menengah(SIKIM).
2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan jumlah dan kualitas produksi.
3. Meningkatkan kualitas SDM di masing-masing sektor terkait dengan melakukan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan promosi Investasi disegala sektor, terutama di Industri Pengolahan.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan dengan indikator Koefisien Gini dapat dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut:

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Koefisien Gini (BPS, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan	Koefisien Gini (10.1.1)	0.296	0.321	91,55	0.249	0.321	71,08

Berdasarkan Tabel 3.20 diatas menunjukkan bahwa realisasi Koefisien Gini Tahun 2020 adalah 0,321 dari target 0,296 atau sebesar 91,55% dari target.

Pencapaian angka Koefisien Gini tahun 2020 ini apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD masih selisih 0,028 atau baru mencapai 71,08% dari target akhir RPJMD dengan nilai 0,249. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, namun angka Koefisien Gini Provinsi Riau masih lebih baik dari rata-rata Koefisien Gini Nasional yang ada pada angka 0.385 atau lebih baik 0.064 poin dari rata-rata nasional.

Capaian Koefisien Gini Provinsi Riau 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif, secara rinci dijelaskan pada Grafik halaman berikut:

Nilai Koefisien Gini Provinsi Riau 2016-2020



Grafik 3.12. Nilai Koefisien Gini 2016-2020 (BPS Provinsi Riau, 2020)

Tren pergeseran angka Koefisien Gini Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir menunjukkan pergeseran kearah yang lebih baik sebesar 0.029 poin dari tahun 2016. Meskipun trennya tidak selalu menurun, hal ini menunjukkan progres yang positif terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat di Provinsi Riau.

Penyebab tidak tercapainya pemerataan pendapatan antara lain: tidak meratanya pendidikan dan kesehatan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan perbedaan pendapatan dan orbitasi.

Untuk menekan besarnya kesenjangan pendapatan yang terjadi Provinsi Riau, berikut upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, antara lain:

1. Meningkatkan 2 Indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Pendidikan dan Kesehatan, yang mana kedua hal ini memberi pengaruh terhadap pemerataan pendapatan;
2. Meningkatkan Infrastruktur, terutama pelayanan transportasi ke Kabupaten/Kota guna memberikan kemudahan akses masyarakat

untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan merata;

3. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan melakukan perbaikan pada PDRB ADHK di Provinsi Riau;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama untuk rakyat miskin;

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan PDRB ADHK Provinsi Riau dan menurunkan angka Koefisien Gini sebesar Rp. 26.049.866.556,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.650.982.610,- (86.95%). Program untuk meningkatkan PDRB ADHK Provinsi Riau dan Koefisien Gini adalah sebagai berikut :

1. Program kerjasama fasilitasi dan pengembangan perwilayahan industri;
2. Program penumbuhan dan pengembangan industri;
3. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan;
4. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
5. Program peningkatan produksi hasil perternakan;
6. Program pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
7. Program pemberdayaan penyuluhan perkebunan;
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
9. Program pengembangan budidaya perikanan; dan
10. Program pengembangan perikanan tangkap;

12

Sasaran ke-12: Meningkatnya Investasi Daerah

Investasi atau penanaman modal, dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber subjek penanam modal, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan / atau Pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

Meningkatnya Investasi Daerah dalam RPJMD diukur dengan indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB merupakan salah satu indikator dalam PDRB menurut pengeluarannya, bersama Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pengeluaran Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Perubahan Inventori, Ekspor Barang dan Jasa, dikurangi Import Barang dan Jasa.

PMTB menurut BPS adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kemandirian investasi daerah dengan indikator Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat dilihat pada Tabel 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.21. Capaian Kinerja PMDN dalam Juta Rupiah (BPS,2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Juta Rupiah)	158.703.070,-	148.080.000	93.31	177.333.000	148.080.000	83.50

PMTB Provinsi Riau pada tahun 2020 mencapai 148,080.000.Juta Rupiah dari yang ingin dicapai 158.703.070,00 Juta Rupiah (93,31%). Jika dibandingkan dengan RPJMD, capaian ini masih 83,50 persen daripada target RPJMD yaitu 177.333.000 Juta Rupiah. Nilai PMTB sendiri merupakan nilai nonkumulatif, yang artinya nilai setiap tahun tidak dijumlahkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dilihat tren, nilai PMTB dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Namun untuk tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3.13 halaman berikut :

Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Riau (Milyar Rupiah)



Grafik 3.13. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Riau 2016-2020 (BPS,2020)

Berdasarkan Grafik 3.13. diatas menunjukkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017-2018 dengan peningkatan sebesar 3,76%, sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar -1,86%. Namun penurunan nilai PMTB Provinsi Riau masih di atas penurunan nilai PMTB Nasional yaitu -4,54%.

Penurunan nilai PMTB Provinsi Riau disebabkan oleh turunnya PMDN dan PMA Provinsi Riau, yang pada ini (13.04 Triliun Rupiah) mengalami kontraksi sebesar 0.22 persen dibanding tahun 2019 senilai 13.07 Triliun Rupiah. Ada perbedaan tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu perubahan komposisi jumlah investasi di Provinsi Riau, yang pada tahun 2019, PMA merupakan kontribusi terbesar investasi yaitu Rp. 9,27 Triliun namun turun menjadi Rp. 1.04 Triliun pada tahun ini, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi yang merebak keseluruh dunia, menjadikan perekonomian internasional tidak stabil, mengakibatkan lesunya investasi terhadap Negara, khususnya Provinsi Riau, terlebih lagi

adanya pergeseran basis struktur PDRB, semula Pertambangan dan Penggalian yang merupakan daya tarik utama dari Investor Asing menjadi Industri Pengolahan yang lebih berimbang antara investasi asing maupun dalam negeri. Meskipun PMA mengalami penurunan, namun PMDN di Provinsi Riau pada Triwulan yang sama meningkat di tahun ini sebesar, 215,66 persen, yang semula 3.80 Triliun Rupiah menjadi 12 Triliun Rupiah. Investasi tertinggi diperoleh dari Kota Dumai, salah satu penyebab tingginya investasi dari Kota Dumai adalah dengan telah diresmikannya Tol Pekanbaru-Dumai pada tahun ini, memberikan kemudahan akses ke Kota Dumai yang semula memerlukan waktu hingga 5 jam, kini bisa di tempuh hanya dalam waktu 2 jam. Peningkatan investasi dalam negeri ini juga di dorong oleh program pemerintah pusat untuk memberikan stimulus kepada masyarakat dengan melakukan belanja pemerintah secara masif, sehingga meningkatkan permintaan dalam negeri dan dunia usaha bergerak untuk berinvestasi.

Didalam upaya peningkatan PMTB Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau menggunakan anggaran sebesar Rp 848.288.022,00 Milyar atau 86.04% dari pagu Rp. 985.905.700,00 Milyar dengan efisiensi sebesar 13.96%, Adapun program yang mendukung untuk sasaran ini adalah Program peningkatan investasi dan Program penyelenggaraan perizinan

13 Sasaran ke-13: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan Pangan Daerah merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,

aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (BPS,2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	50.00	64.12	123.24	60.00	64.12	106,87

Berdasarkan Tabel 3.22. diatas menunjukkan bahwa capaian IKP Provinsi tahun 2020 yaitu 64.12 persen atau 123.24 persen dari target tahun 2020 yaitu 52.00. Apabila dibandingkan dengan target yang tertera di dokumen RPJMD Provinsi Riau telah mencapai 106,87 persen dari target (60.00). Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2020 jika dibandingkan dengan capaian IKP Nasional berada di bawah rata-rata (72.11).

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi melalui stabilitas pasokan dan harga pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian berdasarkan ketersediaan data tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dalam penyusunan IKP digunakan 9

(sembilan) indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Sembilan indikator yang digunakan sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Tercapainya 9 (sembilan) indikator IKP di atas dipengaruhi oleh meningkatnya nilai pada masing-masing indikator IKP secara kumulatif, seperti meningkatnya persentase rumah yang memiliki akses ke air bersih, meningkatnya angka harapan hidup pada saat lahir, meningkatnya rata-rata lama sekolah. Meskipun peningkatan dialami di beberapa indikator IKP, namun terdapat indikator yang mengalami penurunan seperti persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.1.597.009.458,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.225.210.321,00 (76.72%), dengan program kerja pendukung sebagai berikut:

1. Program peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri;
2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan;
3. Program peningkatan ketahanan pangan.

14 Sasaran ke-14: Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur angka kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri (*basic needs approach*).

Sedangkan konsep pengangguran diartikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan (BPS, 2020).

Untuk mengukur sasaran angka kemiskinan dan pengangguran menggunakan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Penduduk Miskin
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran dengan indikator persentase penduduk miskin di Provinsi Riau tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.23. berikut:

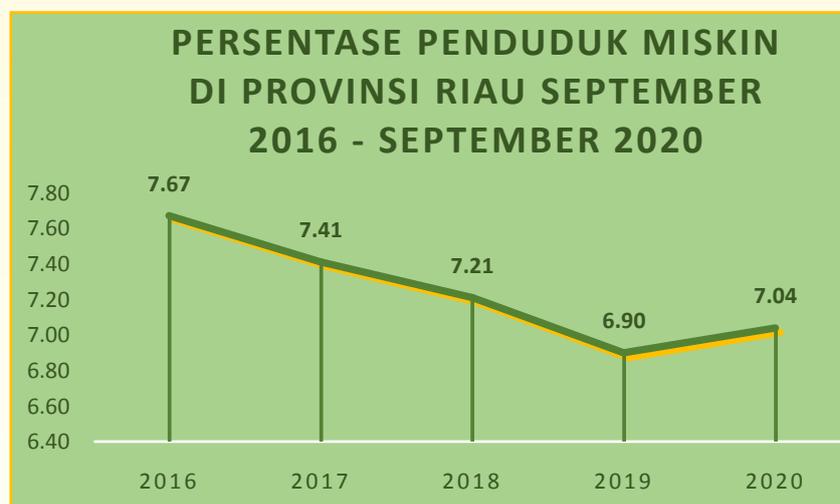
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau tahun 2020 (BPS,2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase Penduduk Miskin	6.75	7,04	95,70	6.28	7,04	87,90

Berdasarkan Tabel 3.23 menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Provinsi Riau pada Maret 2020 adalah sebesar 7,04 persen dari target 6,75 persen atau capaian sebesar 95,70%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau tahun 2020 memiliki 491,22 ribu jiwa penduduk

miskin. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2.03 persen dari tahun 2019. Penduduk miskin mayoritas berlokasi di daerah pedesaan sebanyak 312,76 ribu jiwa, jauh melebihi jumlah penduduk miskin di perkotaan yang tercatat hanya 178,46 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Nasional (10,19%), Provinsi Riau memiliki persentase penduduk miskin yang lebih sedikit (7,02%)

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau mencapai 87,90% (7,02 persen).



Grafik 3.14. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau September 2016-2020 (BPS,2020)

Dari Grafik 3.14 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun 2016-2019, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,03%. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK. Semakin tinggi GK, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan Provinsi Riau pada September 2020 sebesar Rp.546.090,- per kapita per bulan, jika dibandingkan dengan

gariskemiskinan Nasional Rp.458 947,- per kapita per bulan, garis kemiskinan Provinsi Riau selalu berada diatas garis kemiskinan Nasional, artinya alat ukur kemiskinan Provinsi Riau selalu lebih tinggi, atau bisa disebut batas atas kemiskinan di Provinsi Riau, tidak termasuk kategori miskin secara nasional.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau antara lain :

1. Ekonomi Riau triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,74 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 2,77 persen (y-on-y).
2. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau sebesar 6,32 persen. Terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,76 persen.
3. Sebanyak 520,92 ribu orang (10,53 persen dari penduduk usia kerja) terdampak COVID-19 pada Agustus 2020, dengan rincian: 35,40 ribu penduduk menjadi Pengangguran, 10,60 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja, 28,61 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja, dan 446,31 ribu penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (*Shorter Hours*).

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian Sasaran Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Perekonomian Masyarakat terutama Masyarakat Desa melalui pengembangan BUMDes dan Usaha Kecil daerah, Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG), meningkatkan Koperasi Aktif yang memiliki sertifikat, dan mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan;

2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan kualitas rehabilitasi dasar, dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan;
3. Meningkatkan daya beli masyarakat;
4. Menyalurkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi, serta menghidupkan rasa sosial di tengah masyarakat agar mendorong masyarakat yang tidak terdampak untuk lebih saling membantu ditengah pandemi Covid-19.

Capaian kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.23. berikut:

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau tahun 2020 (BPS,2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.02	6.32	95.02	5.76	6.32	90,28

Pengangguran dapat diartikan orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 sampai 64 Tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan, dengan demikian indikator ini bertujuan untuk mengetahui angka pengangguran yang ada di Provinsi Riau.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2020 sebesar 6.32 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur. Angka ini meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan Agustus 2019 dengan nilai 5.97 persen. Nilai TPT Provinsi Riau tahun 2020 masih berada pada 95.02 persen dari target yang telah ditetapkan untuk tahun ini yaitu 6.02 persen, dan jika dibandingkan dengan target akhir rencana jangka menengah yang ada dalam dokumen RPJMD, masih memerlukan 9.72 persen lagi, dengan target akhir 5,76 persen dan capaian 90.28 persen. Berikut adalah gambar pergerakan nilai TPT di Provinsi Riau dari 2016-2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau 2016-2020



Grafik 3.15. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau 2016-2020 (BPS,2020)

Jika dilihat 5 tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau selama ini selalu mengalami penurunan, namun untuk tahun 2020, pengangguran meningkat 0.26 persen, peningkatan ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi.

TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi daripada TPT di perdesaan, yaitu 8.73 persen untuk perkotaan atau meningkat 0.96 persen, dan 4.69 di perdesaan atau meningkat 0.29 persen.

Tabel 3.25. Persentase Pertumbuhan TPT se-Sumatera Tahun Provinsi Riau (BPS,2020)

No.	Provinsi	Persentase Pertumbuhan TPT
1	2	5
1	<i>Aceh</i>	<i>0.42</i>
2	<i>Sumatera Utara</i>	<i>1.52</i>
3	<i>Sumatera Barat</i>	<i>1.5</i>
4	<i>Riau</i>	<i>0.56</i>
5	<i>Jambi</i>	<i>1.07</i>
6	<i>Sumatera Selatan</i>	<i>0.98</i>
7	<i>Bengkulu</i>	<i>0.81</i>
8	<i>Lampung</i>	<i>0.64</i>
9	<i>Kep. Bangka Belitung</i>	<i>1.67</i>
10	<i>Kep. Riau</i>	<i>2.84</i>
	INDONESIA	1.84

Dari Tabel 3.25 diatas menunjukkan bahwa dari pertumbuhan nilai TPT Se Sumatera, Provinsi Riau berhasil menekan jumlah pertumbuhannya, yaitu hanya 0.56 persen, atau berada posisi ke 2 se Sumatera setelah Aceh. Meskipun pada 2019 TPT Provinsi Riau masih diatas nilai nasional, tetapi untuk tahun ini TPT Provinsi Riau masih lebih rendah dari rata-rata TPT Nasional.

Keterkaitan erat antara angka TPT dan tingkat pertumbuhan ekonomi, menjadi alasan kenapa meningkatnya TPT pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi penentu seberapa besar perluasan kesempatan kerja baru, mengalami perlambatan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang merebak secara global. Dan jika dilihat dari data BPS, hampir diseluruh Indonesia mengalami peningkatan jumlah TPT. Meskipun capaian kinerja tidak mencapai target, tapi Pemerintah

Provinsi Riau berupaya untuk menekan lajunya tingkat pengangguran di Provinsi Riau.

Jika dilihat menurut pendidikannya, SMA, SMK dan Universitas merupakan kelompok pendidikan dengan persentase tertinggi yang menganggur masing-masing 8.95 persen untuk SMA, 10.51 persen untuk SMK dan 7.05 persen untuk Universitas, berbanding terbalik dengan pendidikan SD atau lebih rendah dan SMP yaitu 3.53 persen untuk SD atau lebih rendah, dan 4.86 persen untuk SMP. Hal ini dikarenakan angkatan kerja yang berpendidikan lebih rendah cenderung mau menerima pekerjaan apasaja di ikuti dengan penggajian yang tidak tinggi. Namun jika dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikannya, SD, SMA, dan SMP menempati pendidikan dengan jumlah penduduk bekerja tertinggi dengan nilai 32.99 persen (SD), 23.53 persen (SMA), 19.78 persen (SMP).

Selain karena adanya pandemi yang menghambat perekonomian, mengakibatkan meningkatnya TPT di Provinsi Riau, ada juga penyebab terjadinya pengangguran, antara lain:

1. Tidak seimbang nya pertumbuhan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, terbatas nya kesempatan kerja yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan tidak tersedianya lapangan kerja yang dipersiapkan untuk lulusan SMK (SMA Kejuruan), sehingga banyaknya pengangguran di tingkat SMK, dan terlihat juga dari persentase lulusan SMK yang sudah bekerja, ini menandakan tidak sinerginya SMK di persiapkan dengan lapangan kerja yang tersedia;
2. Kualitas SDM angkatan kerja yang relatif tidak memiliki daya saing, seperti kurangnya kompetensi yang memenuhi kualifikasi di beberapa pekerjaan, dan juga kurangnya kemampuan serta motivasi SDM dalam mengakses lapangan pekerjaan.
3. Motivasi dan jiwa kewirausahaan angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru yang masih rendah

Secara umum, nilai TPT sangat bergantung dengan pertumbuhan ekonomi, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara tidak langsung terkait dengan penurunan TPT. Selain upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilakukan juga peningkatan kualitas SDM angkatan kerja, dengan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, memfasilitasi angkatan kerja agar menjadi wirausahawan tangguh, dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja lokal ke perusahaan-perusahaan.

Selain itu, usaha lain yang telah dilakukan terus mengoptimalkan program – program untuk menanggulangi pengangguran dan perluasan kesempatan kerja seperti kegiatan Kegiatan Padat Karya, tenaga kerja mandiri (TKM), terapan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan infrastruktur, memfasilitasi pemberian bantuan pinjaman kepada masyarakat kerja yang berpotensi mengembangkan usaha, serta memperkuat Lembaga yang mendorong produktifitas, pelatihan dan kewirausahaan. Program padat karya sendiri bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Program padat karya bertujuan agar tersedianya kesempatan kerja atau usaha dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi produktif pedesaan yang berkesinambungan. Juga terbangunnya fasilitas infrastruktur ekonomi pedesaan dengan jangka waktu tertentu dan Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya bertujuan untuk penciptaan perluasan kesempatan kerja, dengan bentuk kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur.

Pelaksanaan upaya penurunan angka pengangguran di Provinsi Riau tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.142.606.133,- atau 95,11% dari total pagu anggaran Rp 2.252.732.559,- artinya terdapat efisiensi sebesar 4,89% guna mencapai

kinerja tersebut. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja penurunan angka pengangguran diantaranya :

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan

15

Sasaran ke-15: Meningkatnya kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan Pembinaan

Budaya Melayu merupakan ciri khas dari daerah Riau yang dihasilkan dalam aspek kehidupan orang-orang melayu. Wilayah Provinsi Riau memiliki kebudayaan dan kesenian yang khas dari daerahnya sendiri yaitu Budaya Melayu.

Kebudayaan Melayu di Provinsi Riau masih berada dalam tahap pembenahan. Disisi lain, masyarakat Riau masih banyak yang belum memahami kebudayaan Melayu itu sendiri, karena masih kurangnya sosialisasi dan publikasi serta lembaga-lembaga pendidikan yang berperan dalam menyebarkan kebudayaan melayu.

Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk menjadikan Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu. Untuk itu, dilakukan upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sasaran Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan

Perlindungan (%); Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan (%); dan Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan (%).

Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan Provinsi Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan di Provinsi Riau tahun 2020 (Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan	72.00	70.02	97,25	95.00	70.02	73.71

Berdasarkan Tabel 3.26. menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan (%) pada tahun 2020 adalah 70,02% dari target perubahan yaitu 72,00% dengan capaian kinerja mencapai 97,25%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya mencapai 73,71% dari target yang ditetapkan 95%. Upaya perlindungan dengan menjaga keberlanjutan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan Provinsi Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan di Provinsi Riau tahun 2020 (Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan	2	1.60	80.00	25	1.60	6.40

Berdasarkan Tabel 3.27. menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan (%) pada tahun 2020 adalah 1,60% dari target perubahan 2,00% dengan capaian kinerja sebesar 80,00%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya mencapai 6,40% dari target yang ditetapkan 25%. Upaya pengembangan dengan menghidupkan ekosistem kebudayaan dengan meningkatkan, memperkaya dan menyebarkan objek pemajuan kebudayaan.

Capaian Kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28. Capaian Kinerja PersentaseObjek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan di Provinsi Riau tahun 2020 (Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan , pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan	2	1.40	70.00	25	1.40	5.60

Berdasarkan Tabel 3.28 Menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang MendapatkanPemanfaatan (%) pada tahun 2020 adalah 1,40% dari target perubahan 2,00% dengan capaian kinerja sebesar 70,00%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hanya mencapai 5,60% dari target yang ditetapkan 25%.

Adapun kendala-kendala yang ada dalam pencapai target kinerja pada tahun 2020 yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku kebudayaan untuk melakukan perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang ada;
2. Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota dan lembaga yang terkait terhadap pendataan situs-situs budaya atau objek wisata;
3. Masih terdapat objek kebudayaan yang belum diinventarisir
4. Kurangnya SDM yang memahami tentang kebudayaan

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada Pemerintahan Provinsi Riau melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada para pelaku kebudayaan tentang pentingnya melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap situs-situs budaya;
2. Meningkatkan Koordinasi kepada kabupaten/kota dan lembaga terkait untuk pendataan situs-situs budaya dan objek wisata
3. Melakukan inventarisir terhadap objek kebudayaan baik yang berada di Provinsi maupun di kabupaten/kota
4. Melakukan Pembinaan dengan pemberdayaan SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan untuk peningkatan peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Upaya Pelestarian Kebudayaan tertuang pada UU. No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya serta diturunkan menjadi Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang mengidentifikasi 11 Obyek Pemajuan budaya yang wajib dilestarikan antara lain :

1. Tradisi Lisan
2. Manuskrip (Naskah Kuno)
3. Adat Istiadat
4. Permaianan Rakyat
5. Olahraga Tradisional
6. Pengetahuan Tradisional
7. Teknologi Tradisional
8. Seni (seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik)
9. Bahasa
10. Ritus (Ritual Khusus).
11. Cagar Budaya (UU No. 11 Tahun 2010)

Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya pendataan terhadap objek pemajuan kebudayaan melayu Riau yang terangkum dalam dokumen PPKD sebanyak 3.810 Objek Pemajuan kebudayaan Melayu Riau. Obyek-Obyek ini sebagai identitas daerah yang wajib

dilestarikan dalam tataran perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Berdasarkan 3 (tiga) Indikator pada sasaran meningkatnya kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, terdapat permasalahan/kendala secara umum, yaitu : adanya pergeseran anggaran yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan. Pergeseran anggaran diikuti dengan perubahan target pada perjanjian kinerja.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.149.287.669,00 dengan realisasi anggaran Rp 3.912.904.849,15 (94,30%)Alokasi anggaran tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program yang mendukung pencapaian kinerja pada 3 (tiga) indikator tersebut yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan.

16

Sasaran ke-16: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Wisatawan (*tourist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

1. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
2. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

Untuk mengukur jumlah kunjungan wisatawan mancanegara digunakan perhitungan jumlah wisatawan asing yang melakukan kunjungan ke Provinsi Riau dilakukan melalui perhitungan pada pintu masuk :

- a. Bandara Sultan Syarif Kasim II
- b. Pelabuhan Dumai
- c. Selat Baru Bengkalis
- d. Selat Panjang

dan bekerjasama dengan BPS melalui *mobile positioning data* untuk melacak wisatawan yang tidak teridentifikasi pada pintu masuk.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Riau pada tahun 2020 dan tahun akhir RPJMD 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Riau tahun 2020 (BPS,2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	47.350	67.833	143,26	278.325	67.833	24.37%

Berdasarkan Tabel 3.29 menunjukkan bahwa realisasi Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Tahun 2020 adalah 67.833 orang dengan capaian kinerja sebesar 143,26%. Pencapaian kinerja ini telah mencapai target perubahan yang ditetapkan yaitu 47.350 orang.

Perubahan target ini dilakukan mengingat adanya dampak pandemi covid-19 terhadap penurunan angka jumlah kunjungan wisatawan. Dari tabel berikut, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Riau terbanyak pada Januari-Maret 2020. Sejak April hingga November 2020, kunjungan wisatawan asing mengalami penurunan yang sangat signifikan, akibat adanya pemberlakuan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia. Wisatawan mancanegara yang masuk lebih banyak melalui Pelabuhan Kota Dumai, karena tidak dibukanya akses orang asing masuk melalui bandara Sultan Syarif Kasim II.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau telah tercapai 24,29%, mengingat tipe perhitungan indikator ini bersifat nonkumulatif dengan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 278. 325 orang.

Berikut ini rincian data jumlah wisatawan mancanegara di provinsi riau pada tahun 2020 berdasarkan pintu masuk utama :

Tabel 3.30. Data Jumlah Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Riau Tahun 2020

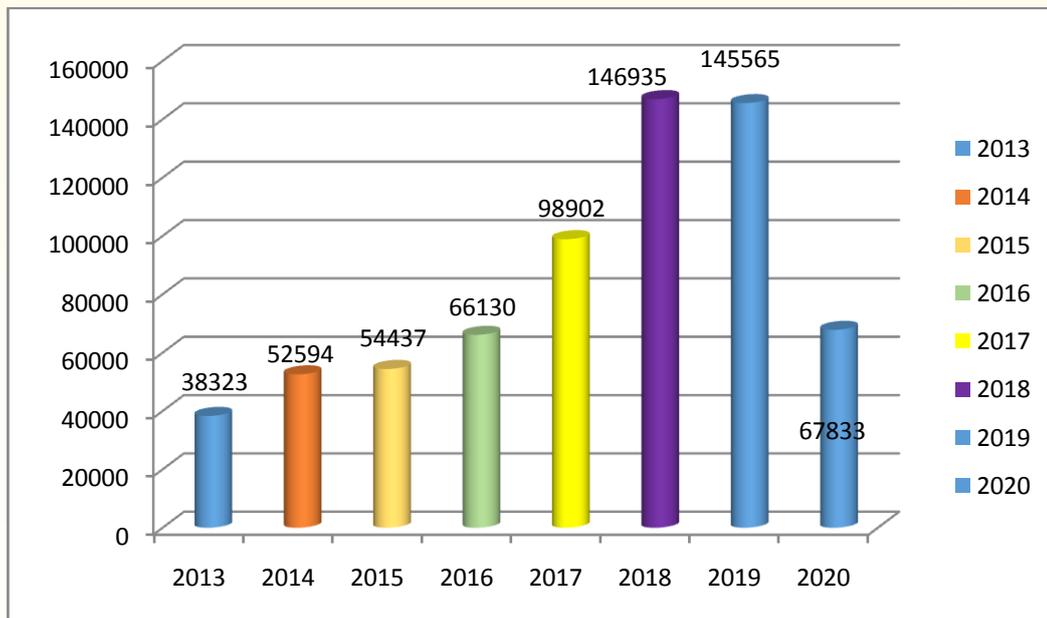
NO	BULAN	WISMAN (BERDASARKAN PINTU MASUK UTAMA)				
		BANDARA SSK II	KOTA DUMAI	KAB. BENGKALIS	KAB. KEP. MERANTI	MOBILE POSITIONING DATA BPS
1	JANUARI	3.191	1.710	355		15.350
2	FEBRUARI	2.357	1.144	261		6.732
3	MARET	1.239	646	193		6.788
4	APRIL	0	124	0		4.717
5	MEI	0	636	0		4.352
6	JUNI	1	588	0		4.001
7	JULI	0	258	0		3.841
8	AGUSTUS	2	297	0		3.883
9	SEPTEMBER	3	257	0		4.398

NO	BULAN	WISMAN (BERDASARKAN PINTU MASUK UTAMA)				
		BANDARA SSK II	KOTA DUMAI	KAB. BENGKALIS	KAB. KEP. MERANTI	MOBILE POSITIONING DATA BPS
10	OKTOBER	0	268	0		
11	NOVEMBER	4	237			
12	DESEMBER	0				
	JUMLAH	6.797	6.165	809	0	54.062
	TOTAL	67.833				

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan Tabel 3.30 diatas menunjukkan bahwa wisawatan mancanegara mengalami penurunan yang signifikan mulai bulan April hingga Desember tahun 2020, sejak diberlakukannya pembatasan penerbangan internasional.

Dibandingkan dengan realisasi kunjungan wisatawan tahun 2013-2020 terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegera sebagaimana grafik berikut.



Grafik 3.16. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2013-2020 (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2020)

Berdasarkan Grafik 3.16 diatas menunjukkan bahwa penurunan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut terkait pelarangan

sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran Menkumham RI Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak 2 April 2020 akibat merebaknya wabah Covid-19, sehingga dampaknya tentu sangat besar terhadap industri pariwisata.

Turunnya wisman terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Kurang lebih turun USD1,3 miliar penerimaan devisa dari pariwisata. Tiongkok sebagai Negara asal wisatawan mancanegara terbanyak kedua di Indonesia. Berdasar data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), tenaga yang terserap pada usaha-usaha pariwisata terus meningkat. Bukan hanya dari jumlah tenaga kerja, pangsa (*share*) pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional juga terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 12,74 juta orang atau 10,53 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 121,02 juta orang.

Industri pariwisata dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya.

Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisman pada masa pandemi adalah dengan meyakinkan para wisatawan bahwa objek wisata yang ada di Provinsi Riau adalah tempat yang aman

untuk dikunjungi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah berfokus dengan melakukan mitigasi dampak pandemi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus mempersiapkan program dan strategi dalam menghadapinya untuk bangkit pascapandemi.

Beberapa permasalahan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ditutupnya akses masuk wisatawan mancanegara di Bandara Internasional.
2. Ditutupnya lokasi wisata daerah akibat pemberlakuan PSBB.

Pemerintah Provinsi Riau tetap melakukan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara antara lain :

1. Menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
2. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab yang dilakukan dengan memanfaatkan media online yang ada untuk memasarkan objek pariwisata di Provinsi Riau ;
3. Menciptakan sinergitas antara organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk pencapaian kinerja meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara sebesar Rp.840.524.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.811.470.950,00 atau 96,54%. Penggunaan sumber daya keuangan tersebut direalisasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

17

Sasaran ke-17: Meningkatnya kenyamanan Wisatawan Mancanegara

Kenyamanan wisatawan adalah suatu keadaan yang diharapkan stabil, menimbulkan perasaan yang tenang tanpa disertai kekhawatiran ketika sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat tujuan dan menginap selama beberapa waktu. Untuk mengukur kenyamanan wisatawan menggunakan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan.

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara adalah lamanya wisatawan mancanegara mengunjungi suatu daerah dalam satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara berdasarkan *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Lama tinggal wisatawan mancanegara merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan atau devisa yang diterima suatu negara. Semakin lama wisatawan tinggal, maka semakin banyak uang yang akan dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara dengan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut.

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Di Provinsi Riau Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya kenyamanan Wisatawan Mancanegara	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1.28	4.13	333.66	3.76	4,13	109.84

Berdasarkan Tabel 3.31 menunjukkan bahwa realisasi rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Provinsi Riau tahun 2020 adalah 4,13 hari dengan capaian kinerja 333,66% . Rincian rata-rata lama tinggal wisatawan per bulan dapat dilihat pada tabel halaman berikut :

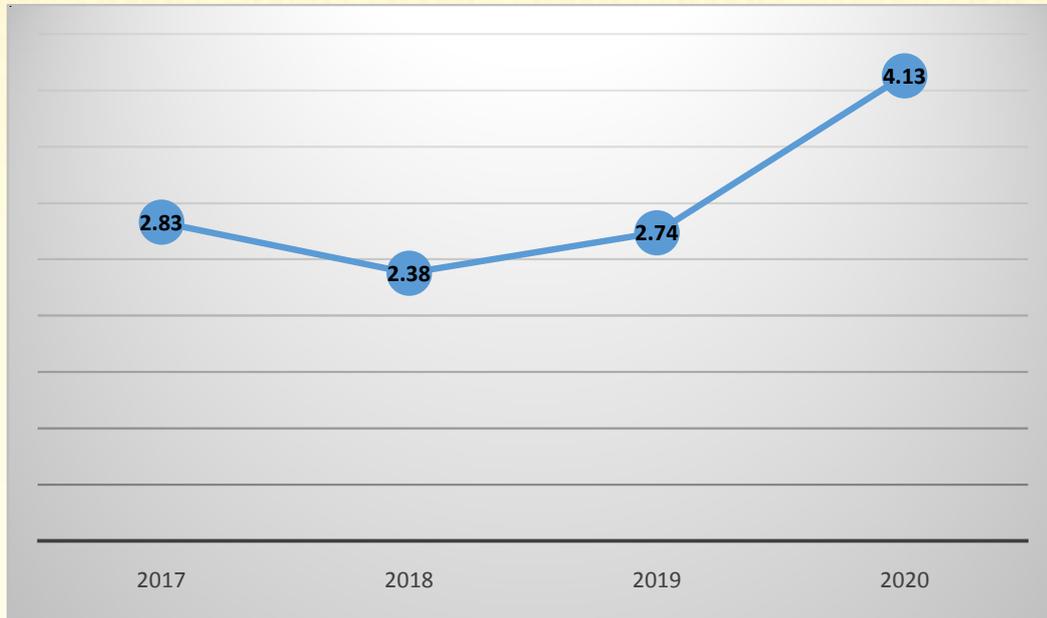
Tabel 3.32. Data Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Riau Tahun 2020 (BPS,2020)

NO	BULAN	LAMA TINGGAL WISATAWAN MANCANEGERA	KETERANGAN
1	JANUARI	2,83	HARI
2	FEBRUARI	3,20	HARI
3	MARET	2,42	HARI
4	APRIL	6,11	HARI
5	MEI	2,35	HARI
6	JUNI	7,04	HARI
7	JULI	4,16	HARI
8	AGUSTUS	2,68	HARI
9	SEPTEMBER	7,05	HARI
10	OKTOBER	3,37	HARI
11	NOVEMBER	5,75	HARI
12	DESEMBER	2,62	HARI
	Rata-Rata Tahun 2020	4,13	HARI

Berdasarkan tabel 3.32 diatas menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara Provinsi Riau sampai Desember 2020, sehingga rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara sampai dengan Desember 2020 adalah 4,13 hari. Hal ini telah melebihi target perubahan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan capaian sebesar 333,66% dari target yang ditetapkan 1,28 hari.

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Provinsi Riau dipengaruhi oleh adanya kebijakan negara asal wisatawan untuk membatasi kedatangan penerbangan dari Indonesia.

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya untuk rata-rata lama tinggal wisatawan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Grafik 3.17. Perbandingan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara 2017-2020 (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2020)

Dari Grafik 3.17. menunjukkan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 50,37%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara adalah :

1. Adanya kebijakan Pemerintah untuk menutup destinasi dan melarang pelaksanaan event yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
2. Rendahnya tingkat pengembangan produk ekonomi kreatif yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah selama pandemi covid-19
3. Relatif rendahnya tingkat sertifikasi hotel dan restoran yang berstandar internasional.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut.

1. Menyusun kebijakan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata, perhotelan dan restoran.
2. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
3. Memfasilitasi sertifikasi bagi hotel dan restoran se Provinsi Riau untuk mendapatkan sertifikat CHSE (*clean, healthy, save, environment sustainability*) dari Kemenpar yang berstandar internasional

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran tahun 2020 untuk sasaran Meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara sebesar Rp.5.709.343.612,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.991.191.599,- (87.42%) melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

18

Sasaran ke-18: Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi

Secara singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik (Perpres 81 tahun 2010).

Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi

birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan, mengimplementasikan agenda kerja 8 (delapan) area perubahan, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dievaluasi berdasarkan beberapa instrument penilaian terkait 8 (delapan) area perubahan sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sasaran Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi diukur dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Tabel 3.33. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020 (Inspektorat Provinsi Riau, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	63.87	65,40*	102,40	69.39	65,40*	94,25

Keterangan : Data PMPRB 2020

Berdasarkan Tabel 3.33 diatas menunjukkan bahwa target capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah sebesar 63,87 dengan realisasi 65,40 (hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan capaian 102,40%. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 69,39 maka capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau adalah sebesar 94,25%.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Riau tahun 2020 yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil, masing-masing

komponen terdiri dari beberapa area perubahan secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.34. PMPRB Provinsi Riau Tahun 2020 (Inspektorat Provinsi Riau, 2020)

Penilaian				Bobot	Indeks RB	
					2019	2020
A	PENGUNGKIT					
	I.	PEMENUHAN (20)		20.00	0.00	16.24
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00		1.56
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00		1.41
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3.00		2.67
		4	PENATAAN TATALAKSANA	2.50		2.12
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3.00		2.80
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50		2.25
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.50		1.48
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50		1.95
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)		10.00	0.00	4.58
		i.	Kualitas Pengelolaan Arsip	1.00		0.69
		ii.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.00		1.00
		iii.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1.00		0.00
		iv.	Kualitas Pengelolaan Aset	1.00		0.00
		v.	Merit System	1.00		0.54
		vi.	ASN Profesional	1.00		0.48
		vii.	Kualitas Perencanaan	1.00		0.00
		viii.	Maturitas SPIP	1.00		0.60
		ix.	Kapabilitas APIP	1.00		0.40
		x.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009	1.00		0.87
	III	REFORM (30)		30.00	0.00	15.79
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00		2.19
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	3.00		1.62
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4.50		0.59
		4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75		2.20

Penilaian				Bobot	Indeks RB	
					2019	2020
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4.50		2.29
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75		1.91
		7	PENGUATAN PENGAWASAN	3.75		1.93
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75		3.06
TOTAL PENGUNGKIT				60.00	0.00	36.61
B	HASIL (40)					
		1	AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10.00	0.00	7.73
		i.	Opini BPK (3)	3.00		3.00
		ii	Nilai SAKIP (7)	7.00		4.73
		2	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10.00	0.00	8.63
		-	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10.00		8.63
		3	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10.00	0.00	9.03
		-	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10.00		9.03
		4	KINERJA ORGANISASI (10)	10.00	0.00	3.44
		i.	Capaian Kinerja	5.00		Blm Diisi
		ii	Kinerja Lainnya	2.00		1.50
		iii	Survei Internal Organisasi	3.00		1.94
TOTAL HASIL				40.00	0.00	28.82
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				100.00	0.00	65.43

Berdasarkan Tabel 3.34 menunjukkan bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau tahun 2020 adalah 65,43 dengan komponen pengungkit ada 3 (tiga) sub komponen yaitu pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform sedangkan pada Komponen Hasil terdiri dari 4 (empat) sub komponen.

Pada sub komponen pemenuhan terdiri dari 8 area penilaian, pada komponen sub hasil antara area perubahan terdiri dari 10 area penilaian dan pada sub komponen reform terdiri dari 8 area penilaian.

Sedangkan pada komponen hasil terdiri dari 4 (empat) sub komponen yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kinerja organisasi.

Pada komponen pengungkit sub komponen tertinggi berada pada aspek pemenuhan dengan bobot 20 dan capaian 16,24 (81,2%) sementara capaian terendah berada pada sub komponen hasil antara area perubahan, dengan bobot 10 dan capaian 4,58 (45,8%),

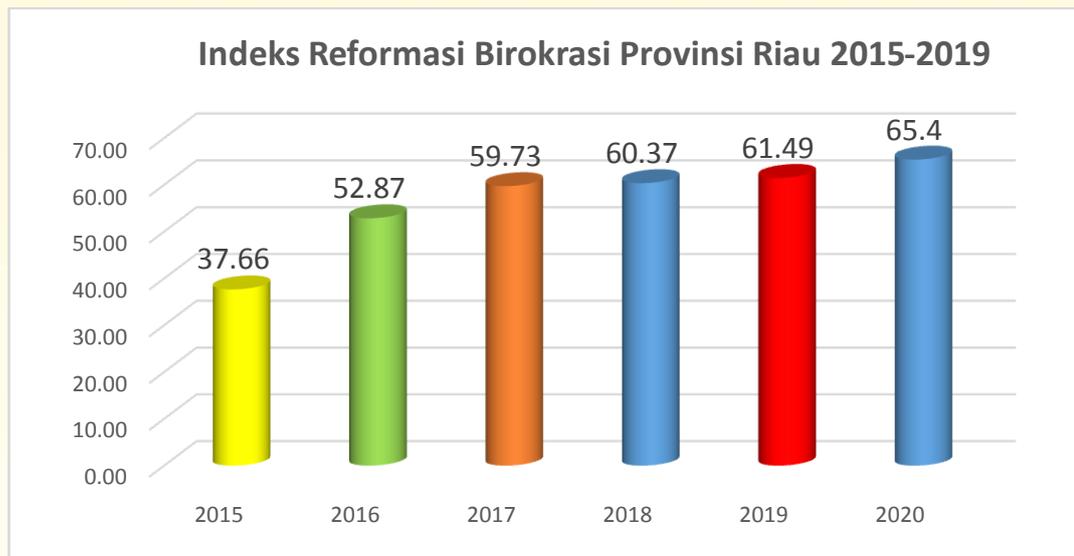
Pada komponen hasil, sub komponen tertinggi berada pada sub komponen pemerintah yang bersih bebas KKN dengan bobot 10 dan capaian 9,03 (90,3%) sementara, capaian terendah berada pada sub komponen kinerja organisasi dengan bobot 10 dan capaian 3,44 (34,4%). Rendahnya capaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) area penilaian yakni : capaian kinerja, kinerja lainnya, dan survey internal organisasi relatif rendah capaiannya.

Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan masih terdapat beberapa komponen, sub komponen, dan area perubahan yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

1. Pada sub komponen hasil antara area perubahan masih ada beberapa area penilaian yang belum pernah dinilai, karena termasuk indikator baru dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, misalnya kualitas pengelola keuangan dan asset, serta kualitas perencanaan.
2. Pada sub komponen kinerja organisasi masih ada area penilaian yang belum diisi karena, didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KEMENPAN RB yaitu : capaian kinerja.
3. Pada area penilaian penguatan pengawasan masih perlu peningkatan terutama terkait dengan antara lain : belum optimalnya pembangunan zona integritas dan penangana, pengaduan masyarakat.

4. Pada area penilaian penataan dan penguatan organisasi, evaluasi yang dilakukan pada perangkat daerah masih belum bisa menggambarkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran.

Untuk melihat gambaran capaian indeks reformasi birokrasi provinsi riau dari tahun 2015-2020 sebagaimana dilihat pada Grafik 3.17 berikut.



Grafik 3.18. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau tahun 2015-2020

Berdasarkan grafik 3.18 diatas menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi Provinsi Riau tahun 2015-2020 meningkat, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2015-2016.

Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Riau, diantaranya :

1. Finalisasi penyusunan *Road Map*2020-2024;
2. Finalisasi penyusunan Tim Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

4. Pengendalian produk hukum yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Perangkat Daerah sampai ke pimpinan secara kontinyu mengidentifikasi produk hukum yang tidak harmonis;
5. Melakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) beberapa OPD;
6. Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Melakukan penyusunan peta proses bisnis;

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk indikator indeks reformasi birokrasi sebesar Rp22.537.584.644,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.678.175.963,90 (78,44%) melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

19

Sasaran ke-19: Meningkatnya Penerapan e- Government

Electronic Government atau *e-government* (e-govt) merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan publik (PBB, 2006). Dalam pelaksanaannya e-government di transformasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Sasaran Meningkatkan Penerapan e-government diukur dari indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.35. Capaian Kinerja SPBE (KemenPAN RB, 2020)

Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Tahun Akhir RPJMD (2024)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatnya Penerapan e-Government	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	3.17	3.51*	110.73	3.50	3.51*	100.29

Keterangan : *capaian tahun 2019

Berdasarkan table 3.35 diatas menunjukkan bahwa realisasi SPBE sebesar 3,51 dari target 3,17, dengan capaian 110,73%. Dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2024 sebesar 3,5, realisasi 3,51 dan capaian 100,29%. Pada tahun 2020, pelaksanaan SPBE Provinsi Riau tidak di evaluasi Kemenpan RB karena pada tahun 2019 Provinsi Riau telah mendapatkan nilai SPBE 3,51 dengan predikat **Sangat Baik**.

Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini ;

Tabel 3.36. Bobot Penilaian SPBE (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2020)

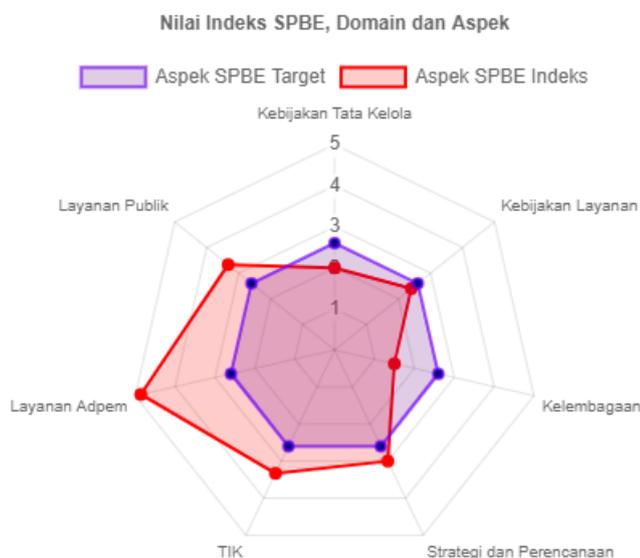
Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Tahapan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah: Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

Penilaian tersebut mencakup aspek kebijakan, tatakelola dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini meliputi layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, kinerja, pelayanan publik, yang berbasis elektronik.

Rincian penilaian indeks SPBE, domain dan aspek (kebijakan SPBE, aspek tata kelola, dan layanan SPBE) sebagai halaman berikut :

NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Indeks SPBE	: 3.51
Predikat SPBE	: Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	: 2.24
➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE	: 2.00
➔ Kebijakan Layanan SPBE	: 2.4
Domain Tata Kelola	: 2.71
➔ Kelembagaan	: 1.5
➔ Strategi dan Perencanaan	: 3.00
➔ TIK	: 3.33
Domain Layanan SPBE	: 4.3
➔ Administrasi Pemerintahan	: 4.86
➔ Pelayanan Publik	: 3.33

Hasil Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap indeks SPBE, domain dan 3 (tiga) aspek dengan nilai masing-masing aspek yakni : kebijakan SPBE : 2,24; aspek tata kelola : 2,71; dan layanan SPBE : 4,3. Dari data tersebut

menunjukkan bahwa aspek layanan SPBE dengan penilaian tertinggi, sedangkan aspek kebijakan SPBE dengan penilaian terendah.

Meskipun Indeks SPBE Provinsi Riau dikategorikan “Sangat Baik”, Pemerintah Provinsi Riau tetap meningkatkan kinerja pelayanan SPBE melalui pelaksanaan program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 24.310.170.311,00 atau 95.27% dari total pagu anggaran Rp 25.517.801.424,50 artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 4.73%.

B. REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar Rp 8.621.797.792.861,57 (98,68%) dari rencana pendapatan yang telah ditetapkan Rp 8.736.933.522.998,05 dengan rincian capaian pendapatan sebagai berikut:

1. PAD dapat direalisasikan sebesar Rp 3.332.148.976.452,57 atau 100,47% dari target Rp 3.316.666.329.545,05, atau menurun dibandingkan dengan PAD tahun 2019 sebesar Rp 3.558.210.585.339,97. Jika dilihat dari masing-masing komponen PAD seluruh komponen PAD meningkat yakni penerimaan pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dana Perimbangan tahun 2020 sebesar Rp 5.266.154.198.405,00, meningkat dari tahun 2019 Rp 5.136.706.027.820,00. sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah tahun 2020 dari pendapatan hibah sebesar Rp 3.251.000.004 menurun dari tahun 2019 (Rp 3.392.000.000,00) sedangkan Pendapatan dana penyesuaian tahun 2020 sebesar Rp 20.243.618.000,00 meningkat dari tahun 2019 (Rp 4.923.997.000,00).

B. BELANJA DAERAH

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp.8.621.797.792.861,57, terdiri dari : PAD sebesar Rp.3.332.148.976.452,57, Dana Perimbangan sebesar Rp.5.266.154.198.405,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.23.494.618.004,00.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.8.818.149.638.132,52. Dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.178.565.059.818,31, atau capaian sebesar 92,75%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau disajikan sebagaimana Tabel halaman berikut.

Tabel 3.37. Realisasi Anggaran Provinsi Riau Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rupiah	%
A	Pendapatan	8.736.933.522.998,05	8.621.797.792.861,57	98,68
1	PAD	3.316.666.329.545,05	3.332.148.976.452,57	100,47
2	Pendapatan Dana Perimbangan	5.369.772.575.453,00	5.266.154.198.405,00	97,58
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.494.618.000,00	23.494.618.004,00	100,00
B	Belanja Daerah	8.818.149.638.132,52	8.178.565.059.818,31	92,75
1	Belanja Tidak Langsung	5.441.919.957.973,00	5.133.319.819.218,92	94,33
2	Belanja Langsung	3.376.229.680.159,52	3.045.245.240.599,39	90,20

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rupiah	%
	Surplus	(81.216.115.134,47)	443.232.733.043,26	
C	Pembiayaan	81.216.115.134,47	81.565.615.134,47	100,43
	Sisa Lebih Pembiayaan Penganggaran (SILPA)	-	524.798.348.177,73.	

Dari Tabel 3.37 menunjukkan bahwa terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 524.798.348.177,73, dari realisasi PAD mencapai 100,47% demikian juga pembiayaan melebihi Target yakni sebesar 100,43%.

Ditinjau dari realisasi PAD sebesar Rp.3.332.148.976.452,57 dan Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp.8.178.565.059.818,31 menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 40,74%.

Belanja Tidak Langsung direalisasikan sebesar Rp.5.133.319.819.218,92 (94,33%) artinya terjadi penghematan sebesar 5,67%, sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp.3.045.245.240.599,39 (90,20%) artinya terjadi penghematan sebesar 9,80%.

Tabel 3.38. Rincian Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2020				Realisasi Keuangan			Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran	Anggaran	Keuangan	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun (tahun)	8.97	9.47	105,57%	99,59%	1.156.200.739.690,86	1.068.294.883.417,00	92,40%	13,17%
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.57	13.2	97,27%					
2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.56	71.6	100,06%	100,06%	744.200.362.748,88	651.359.823.957,58	87,52%	12,81%
3	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks)	88.51	88.14	99,56%	99,56%	1.488.762.451,00	1.272.094.817,00	85,45%	14,13%
4	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Keurukunan Umat Beragama (indeks)	73.34	68.9	94,44%	94,44%	29.890.448.205,00	26.435.653.358,83	88,44%	6,00%
5	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun (%)	-53,03	-48,304	108,91%	108,91%	505.666.417.558,20	450.347.459.577,68	89,06%	19,85%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2020				Realisasi Keuangan			Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran	Anggaran	Keuangan	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	78.21	83.99	107,39%	107,39%	10.974.877.217,00	8.527.181.179,87	77,70%	29.69%
7	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi (%)	92.85	92.34	99,45%	99,45%	10.431.013.912,00	6.270.556.120,00	60,11%	39,34%
8	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik (%)	29.43	21,04	71,49%	71,49%	10.850.798.400,00	9.315.862.147,34	85,85%	-14.36%
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (indeks)	58.3	50,23	86,16%	85,97%	16.222.743.446,00	12.351.775.875,00	76,14%	9,83%
		Indeks Kualitas Udara (indeks)	90.3	90,42	100,13%					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (indeks)	57.59	41,24	71,61%					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2020				Realisasi Keuangan			Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran	Anggaran	Keuangan	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca (GgCO2-e)	343,988	222.518	135,31%	135,31%	13.474.791.058,00	4.894.728.290,00	36,33%	98,98%
11	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK (milyar rupiah)	500,882.71	490.024.473	97,83%	81,42%	26.049.866.556	22.650.982.610	86,95%	7.74%
		Koefisien Gini (10.1.1) (indeks)	0.296	0.321	91,55%					
12	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (juta rupiah)	158.703,07	148.080	93,31%	93,31%	985.905.700,000	848.288.022,000	86,04%	7.27%
13	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	50	64,12	128,24%	128,24%	1.597.009.458,00	1.225.210.321,00	76,72%	51.52%
14	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin (%)	6.75	7.04	95.70%	95.70%	23.198.889.981,00	19.700.462.099,54	84,92%	10.78%
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	6.02	6.32	95.25%	95.25%	2.252.732.559,00	2.142.606.133,00	95,11%	-0.09%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2020				Realisasi Keuangan			Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran	Anggaran	Keuangan	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan (%)	70	70,02	97,25%	82,42%	4.149.287.669,00	3.912.904.849,15	94,30%	-11,88%
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan (%)	2	1,60	80,00%					
		Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan (%)	2	1,40	70,00%					
16	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (jiwa)	47.35	67.833	143,26	143,26%	840.524.000,00	811.470.950,00	96,54%	46,72%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2020				Realisasi Keuangan			Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran	Anggaran	Keuangan	Persentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1.28	4,13	322,66%	322,66%	5.709.343.612,000	4.991.191.599,000	87,42%	235.24%
18	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi (indeks)	63.87	65.40	102.39%	102.39%	22.537.584.644,00	17.678.175.963,90	78,44%	23.96%
19	Meningkatnya penerapan <i>e government</i>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.17	3,51	110,73%	110,73%	25.517.801.424,50	24.310.170.311,00	95,27%	15.46%
TOTAL						237,57%	2.650.535.186.290,44	2.372.644.461.758,98	89,52%	18.93%

Berdasarkan Tabel 3.36 di atas menunjukkan bahwa Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 19 sasaran dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 12 indikator capaiannya Sangat Baik, 12 indikator capaiannya Baik, 3 (tiga) indikator capaiannya Cukup. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2020 adalah sebesar **108,45%** atau kategori **Sangat Baik**.

Dari 19 (sembilan belas) Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024 terdapat 6 (enam) sasaran dengan capaian yang relatif tinggi yaitu :

1. Sasaran meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara dengan capaian 322,66%
2. Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara 143,26%
3. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca dengan capaian 135,31%
4. Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan capaian 128,24%
5. Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dengan capaian 122,84%;
6. Sasaran meningkatnya penerapan *e-government* dengan capaian 110,73%

Sedangkan sasaran yang capaiannya relatif rendah yaitu Sasaran meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air dengan capaian sebesar 71,49%;

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Riau disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 Provinsi Riau, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator, Sasaran Strategis dan capaian Misi.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 19 sasaran dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 12 indikator capaiannya Sangat Baik, 12 indikator capaiannya Baik, 3 (tiga) indikator capaiannya Cukup. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja indikator Tahun 2020 adalah sebesar **108,45%** atau kategori **Sangat Baik**.

Kesimpulan ringkas atas kinerja 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun	105,57	Sangat Baik
	Harapan Lama Sekolah	97.27	Baik
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100.06	Sangat Baik
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99.89	Baik

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks Keurukunan Umat Beragama	94,44	Baik
Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun	108,92	Sangat Baik
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	122,84	Sangat Baik
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	107,39	Baik
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	99,45	Baik
Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	71,49	Cukup
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	86,16	Baik
	Indeks Kualitas Udara	100,13	Sangat Baik
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,61	Cukup
Menurunnya emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca (GgCO ₂ -e)	135,31	Sangat Baik
Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK	97,83	Baik
	Koefisien Gini	91,55	Baik
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	93,31	Baik

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	128,24	Sangat Baik
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	95,70	Baik
	Tingkat pengangguran terbuka	95,02	Baik
Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan	97,25	Sangat Baik
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan	80,00	Baik
	Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan	70,00	Baik
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	143,26	Sangat Baik
Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	322,66	Sangat Baik
Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi (indeks)	102,39	Baik
Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	110,73	Sangat Baik

Akan tetapi masih terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dicapai diantaranya pada sasaran meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air belum mencapai target. Dari pencapaian target kinerja Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik (%) tahun 2020 yaitu 21,04% dari target 29,43% dengan capaian kinerja sebesar 71,49%. Luas lahan irigasi Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 116.971 Ha yang terdiri dari daerah irigasi seluas 10.035 ha dan luas baku daerah irigasi rawa seluas 106.936 ha. Lahan irigasi tersebut tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Persentase dari total daerah irigasi sawah/rawa yang difungsikan dari luas seluruh lahan irigasi yang ada yaitu 21,04%. Untuk meningkatkan kinerja tersebut perlu diprioritaskan kegiatan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan daerah irigasi/daerah irigasi rawa yang menjadi kewenangan provinsi.

Disamping itu, pada sasaran menurunnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau pada tahun 2020 tidak mencapai target, karena terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2019 5,76% menjadi 6,32% pada tahun 2020. Keterkaitan erat antara angka TPT dan tingkat pertumbuhan ekonomi, menjadi alasan kenapa meningkatnya TPT pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi penentu seberapa besar perluasan kesempatan kerja baru, mengalami perlambatan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang merebak secara global. Dan jika dilihat dari data BPS, hampir diseluruh Indonesia mengalami peningkatan jumlah TPT. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup dan melakukan pengurangan tenaga kerja akibat pembatasan sosial yang diberlakukan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19, itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan, Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara, untuk sektor informal yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus

merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal, perusahaannya ada 116.370, dan Jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Jumlah tersebut bukan lah jumlah yang sedikit, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang.

Dalam rangka menangani dampak Covid terhadap perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan beberapa kebijakan yaitu sebagai berikut.

- a. Memberikan keringanan kepada masyarakat melalui penghapusan denda keterlambatan pajak.
- b. kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 April, dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Rincian pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24 juta pelanggan rumah tangga 450 VA mendapatkan listrik gratis. Selanjutnya, 7 juta rumah tangga 900 VA bersubsidi mendapat diskon pembayaran listrik 50 persen selama tiga bulan. Kebijakan ini diperuntukkan bagi rakyat miskin.
- c. Program kartu pra kerja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Kartu Prakerja ini diberikan kepada mereka yang terkena PHK, Pengangguran dan untuk mereka yang baru saja lulus dari pendidikan formal. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan usulan pendataan penerima bantuan kartu pra kerja.
- d. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Bantuan Sosial sebesar Rp500 ribu dengan 1/3 berupa uang tunai dan 2/3 sembako.

Kekurangan yang terjadi selama tahun 2020 telah diinventarisir dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja pada tahun 2021 mendatang. Sasaran program yang belum tercapai akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau dapat dicapai.

B. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Riau di masa mendatang diantaranya dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pengoptimalisasian program kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Riau
2. Peningkatan mutu dan layanan pendidikan terutama pemerataan akses dan mutu pembelajaran yang berbasis teknologi informasi.
3. Penguatan sektor-sektor unggulan dan potensial di Provinsi Riau dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.
4. Mengalihkan Basis struktur PDRB yang semula dari Pertambangan dan Penggalian ke Industri Pengolahan, dengan meningkatkan wilayah industri dengan mengembangkan SIKIM yang beroperasi, serta peningkatan industri hilir dan pemasaran;

5. Meningkatkan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi tanaman perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan dengan menambah jumlah populasi, meningkatkan kualitas produk, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemeliharaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit, peningkatan dan pengendalian produktivitas;
6. Meningkatkan promosi Investasi disegala sektor, terutama di Industri Pengolahan.
7. Memberi peningkatan akses rumah sehat dan layak huni bagi rumah tangga miskin;
8. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan kualitas rehabilitasi dasar, dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu;
9. Mengoptimalkan penerapan reformasi birokrasi berbasis manajemen kinerja untuk mewujudkan *good governance*.

**PRESTASI & PENGHARGAAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

1. - Pengelolaan Mutasi kepegawaian Terbaik
- Peringkat Ketiga Penghargaan BKN Award 2020 Kategori Penilaian Kompetensi



2. Innovative Government Award (IGA) 2020 sebagai Provinsi Sangat Inovatif dari Kemendagri RI



3. Peringkat Kedua Penghargaan Saber Pungli Tahun 2020 dari Satgas Nasional Saber Pungli



4. UPT. Kompetensi mendapat Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Grade A



5. Penghargaan pembina K3 terbaik



6. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Peringkat VIII "baik" pada Kategori Pemerintah Daerah Provinsi



7. Provinsi Riau menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut



8. Penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020

